

**INTERPRETASI NILAI-NILAI HADIS POLITIK
MELALUI PARADIGMA INTEGRASI INTERKONEKSI**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Disusun Oleh:
Deffananda Febrian S. P.
NIM. 21105050039
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1140/Un.02/DU/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : INTERPRETASI NILAI - NILAI HADIS POLITIK MELALUI PARADIGMA INTEGRASI INTERKONEKSI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEFFANANDA FEBRIAN SUKMA PRAMUDYA
Nomor Induk Mahasiswa : 21105050039
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 686cded84ab7b



Penguji II

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 686cf2e5069d3



Penguji III

Lathif Rifa'i, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 686cde755b97



Yogyakarta, 25 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 686ddbaab777f

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Deffananda Febrian Sukma Pramudya

NIM : 21105050039

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Interpretasi Nilai-Nilai Hadis Politik Melalui Paradigma Integrasi-Interkoneksi

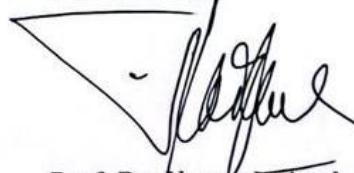
Setelah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Juni 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag

NIP: 196912121993032004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

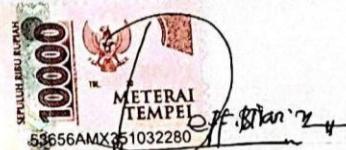
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deffananda Febrian Sukma Pramudya
NIM : 21105050039
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : Interpretasi Nilai-Nilai Hadis Politik Melalui Paradigma Integrasi-Interkoneksi

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah skripsi ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah skripsi ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Deffananda Febrian Sikma Pramudya
NIM: 21105050039

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MOTTO

“Berani bermimpi besar adalah langkah pertama dalam meraih impian itu”

“Keberhasilan tidak terletak pada keberuntungan, melainkan pada persiapan yang tekun”

“Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lebih bijaksana”

– *Henry Ford* –

“Setiap kesalahan adalah langkah menuju kesuksesan jika kamu belajar darinya”

– Anonim



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMPAHAN

Skripsi ini ditulis oleh penulis dipersembahkan untuk:

Kedua orang tua, Bapak Sumardi dan Ibu Umi Sholikhah

Kakak penulis, Moch. Eka Sandi Nuril Huda, beserta istri

Seluruh guru penulis, yang telah menyampaikan dan memberikan ilmunya

Seluruh pihak yang menyertai penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik dibawah
ع	Ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti huruf “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الاعلياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyyā</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhamah ditulis “t”.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitrī</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	Fathah	Ditulis	A
ـ	Fathah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاہلیۃ	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya mati یسعی	Ditulis Ditulis	A <i>yas'ā</i>
Kasrah + ya mati کریم	Ditulis Ditulis	I <i>karīm</i>

Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	U <i>furiḍ</i>
----------------------------	--------------------	-------------------

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ اعْدَتْ لَنْ شَكْرَتْمَ	Ditulis Ditulis Ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'idat</i> <i>la'in syakartum</i>
--	-------------------------------	---

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	<i>al-Qur'ān</i> <i>al-Qiyas</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah, sama dengan huruf Qamariyah tapi huruf setelah (*el*) ditulis kecil.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	<i>al-samā</i> <i>al-syams</i>
-----------------	--------------------	-----------------------------------

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو يافروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>żawi al-furiḍ</i> <i>ahl as-sunnah</i>
------------------------	--------------------	--

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul; **“Interpretasi Nilai-Nilai Hadis Politik Melalui Paradigma Integrasi-Interkoneksi”**. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita senantiasa tetap menjadi umatnya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hadis di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin dapat menyelesaiannya, tanpa adanya dukungan, do'a, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, sudah sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hadis, Drs. Indal Abror, M.Ag., beserta Sekretaris Program Studi, Asrul, M.Hum.
4. Ibu Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), atas bimbingan, arahan, motivasi, serta kesabarannya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Seluruh dosen dan staff Program Studi Ilmu Hadis, yang turut serta berperan penting bagi penulis selama menempuh studi.
6. Keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan menyemangati, khususnya kedua orang tua, Bapak Sumardi dan Ibu Umi Sholikhah, serta Moch. Eka Sandi Nuril Huda beserta istri.
7. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Pembebasan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Korp GIO Stovia.
8. Keluarga besar Ikatan Alumni Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang (IKAPPMAM) di Yogyakarta.

9. Keluarga besar UKM JQH al-Mizan UIN Sunan Kalijaga tahun 2022.
10. Keluarga besar Divisi Tafsir UKM JQH al-Mizan 2022, Izmil Nauval, Nisrina Zain, dan kawan-kawan.
11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Hadis (HMPS) tahun 2023.
12. Keluarga besar Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2025.
13. Keluarga besar Ilmu Hadis, terkhususnya Angkatan 2021 “el-Istiqamah”.
14. Keluarga besar “Daarul Ghanam”, *circle* perkopian yang dilengkapi dengan ilmu dan canda tawa, Abdurrahim Muhammad, Ahmad Subekti, Akmal Muhammad Raihan, Faishal Shafly Yudhatama, Geri Septian, Ilham Syamsul, Muhammad Muammar Kafani, Sastila Yumanda, dan Sri Rahayu.
15. Keluarga besar Keluarga Pelajar Mahasiswa Trenggalek (KPMT) Yogyakarta.
16. Keluarga besar Ikatan Pelajar Mahasiswa (IKPM) Provinsi Jawa Timur.
17. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) 114 UIN Sunan Kalijaga 2024 di Kulon Progo.
18. Saudara Akmal Raihan yang bersedia meminjamkan laptop kepada penulis, dikarenakan laptop penulis tidak memiliki aplikasi hadis dan *microsoft word* yang digunakan dalam pengeraaan skripsi.
19. Untukmu, Cinta Dewi Ashary, yang menjadi alasan di balik setiap kata dalam lembar-lembar ini. Semoga kau temukan dirimu tercermin dalam tinta kesungguhanku. Terima kasih telah menjadi oase di padang pasir keraguan dan mercusuar di samudra pencarian.
You are my best partner ever.

Menjadi harapan penulis, apabila hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan hadis, semoga menjadi manfaat di dunia dan akhirat. Aamiin.

Yogyakarta, Juni 2025

Penulis,



Daffananda Febrina Sukma Pramudya

NIM. 21105050039

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM HADIS KEPEMIMPINAN POLITIK QURAISY.....	28
A. Redaksional Hadis Politik	28
1. Redaksi Hadis	28
2. Takhrij Hadis	30
B. I'tibar Sanad	34
1. Skema Sanad	34
2. Kesimpulan.....	36
C. Analisis Sanad Hadis	38
1. <i>Rijāl al-Hadīs</i>	38
2. Kesimpulan.....	46
D. Analisis Matan Hadis	46
BAB III PEMAHAMAN NILAI-NILAI HADIS POLITIK DENGAN MENGGUNAKAN METODE YŪSUF AL-QARDĀWĪ.....	60
A. Memahami Hadis Sesuai dengan Petunjuk al-Qur'an	61

B. Menghimpun Hadis yang Setema	73
C. Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Latar Belakang, Situasi, dan Kondisi ..	83
D. Membedakan antara sarana yang berubah dan Tujuan yang Tetap	91
E. Memastikan Makna dan Konotasi Kata-Kata dalam Hadis	97
BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN HADIS KEPEMIMPINAN QURAISY DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN INTEGRASI-INTERKONEKSI AMIN ABDULLAH	103
A. Konsep Paradigma Integrasi-Interkoneksi	103
1. Biografi.....	103
2. Latar Belakang	104
3. Konsep Dasar	105
4. Model Pemahaman Integrasi-Interkoneksi.....	107
5. Pendekatan Triadik (<i>Bayānī</i> , <i>Burhānī</i> , dan <i>'Irfānī</i>)	110
B. Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Hadis.....	113
1. Analisis Pemahaman Hadis Kepemimpinan Quraisy Melalui Paradigma Integrasi-Interkoneksi	114
2. Korelasi Pemahaman Hadis Era Kontemporer di Berbagai Sudut Pandang	120
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	151
CURICULUM VITAE.....	154

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada interpretasi nilai-nilai hadis politik dalam konteks masa kini dengan menggunakan metode pemahaman hadis yang digagas oleh Yūsuf al-Qardāwī dan interpretasi hadis menggunakan paradigma integrasi-interkoneksi. Problematika utama yang dihadapi adalah ketegangan antara pemahaman tekstualis yang rigid terhadap hadis tersebut dengan tuntutan sistem demokrasi, HAM, dan pluralisme. Hadis ini sering diinstrumentalisasi untuk legitimasi kekuasaan, sehingga diperlukan interpretasi yang komprehensif dengan pendekatan integrasi-interkoneksi untuk menjembatani dikotomi antara teks agama dan realitas sosial-politik kontemporer. Secara teknstual, hadis yang diriwayatkan dalam *Musnad al-Dārimī* No. 2.563 ini menyatakan bahwa kepemimpinan berada di tangan Quraisy, yang menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai relevansinya dalam konteks masyarakat multikultural saat ini.

Dalam konteks ini, hadis kepemimpinan Quraisy tidak hanya dilihat sebagai bentuk pernyataan historis yang mengatur siapa yang berhak memimpin, melainkan juga sebagai simbol dari karakteristik kepemimpinan ideal, seperti keluhuran sosial, keadilan, solidaritas, kompetensi dan pengaruh yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah berikut; 1) Bagaimana pemahaman tentang hadis-hadis politik? 2) Bagaimana pemahaman interpretasi nilai-nilai hadis politik melalui paradigma integrasi interkoneksi dan implikasi penggunaannya? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *library research*, menggabungkan pemahaman dengan analisis teks (*bayānī*), penalaran kritis (*burhānī*), dan kontekstual-spiritual ('*irfānī*). Dengan menggunakan paradigma integrasi-interkoneksi, penelitian ini berupaya untuk menghubungkan nilai-nilai politik tersebut dengan realitas sosial-politik saat ini, terutama di Indonesia yang kaya akan keragaman suku dan budayanya.

Proses pemahaman hadis dilakukan dengan menggunakan Yūsuf al-Qardāwī yang menawarkan delapan langkah dalam memahami hadis, namun penulis hanya menggunakan lima dari delapan teori tersebut, yakni: 1) Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an. 2) Menghimpun hadis yang setema. 3) Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi, dan kondisi. 4) Membedakan sarana yang berubah dan sarana yang tetap. 5) Memastikan makna dan konotasi kata dalam hadis. Metode ini dipilih karena menawarkan pendekatan yang komprehensif, kontekstual, dan relevan dengan menekankan pada pemahaman hadis yang selaras dengan *maqāṣid al-syārī'ah*, serta menjawab problem kontemporer tentang kepemimpinan.

Hasil penelitian ini yaitu; Penerapan teori *ma 'ānil hadīs* Yūsuf al-Qardāwī pada hadis politik (*Musnad al-Dārimī* no. 2.563) tentang kepemimpinan Quraisy, menekankan pemahaman holistik dengan mengintegrasikan teks hadis dan prinsip universal Al-Quran seperti keadilan, amanah, dan musyawarah, sehingga kepemimpinan Islam ditentukan oleh kualifikasi moral, bukan kesukuan. Metode ini membedakan antara *gāyah* (tujuan) berupa kriteria kepemimpinan yang kompeten dan adil dengan *wasīlah* (sarana) yang bisa berubah sesuai konteks, yakni kepemimpinan Quraisy. Hal ini menunjukkan bahwa sistem modern seperti demokrasi yang berbasis meritokrasi tetap sejalan dengan esensi hadis selama memenuhi prinsip dasar Islam. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa paradigma integrasi-interkoneksi mampu menjembatani dikotomi pemahaman hadis politik dengan mengintegrasikan dimensi normatif, filosofis, dan sosio-historis. Paradigma ini menawarkan solusi holistik dalam merespon tantangan politik kontemporer, seperti demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), dan keadilan sosial. Paradigma integrasi-interkoneksi memungkinkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini untuk diaplikasikan secara kontekstual dalam berbagai dimensi kehidupan modern, seperti aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, emosional, bahkan spiritual. Dengan demikian, dapat ditemukan bahwa kepemimpinan yang seperti efektif dan sah tidak semata-mata ditentukan oleh latar belakang etnis, keturunan, atau suku, melainkan lebih terhadap kualitas dan karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin, sehingga mendorong terciptanya kepemimpinan yang inklusif dan berkeadilan dalam masyarakat multikultural.

Kata Kunci: Hadis Politik, Integrasi-Interkoneksi, Kepemimpinan

ABSTRACT

This study focuses on the interpretation of political hadith values in the present context using the method of understanding hadith initiated by Yūsuf al-Qardāwī and interpreting hadith using the integration-interconnection paradigm. The main problem is the tension between a rigid textualist understanding of the hadith and the demands of democracy, human rights, and pluralism. The hadith is often instrumentalised to legitimise power, so a comprehensive interpretation using an integration-interconnection approach is needed to bridge the dichotomy between religious texts and contemporary socio-political realities. Textually, the Hadīth narrated in Musnad al-Dārimī No. 2,563 states that the leadership is in the hands of Quraysh, which raises questions about its relevance in the context of today's multicultural society.

In this context, the hadith of Quraysh leadership is not only seen as a form of historical statement that regulates who has the right to lead, but also as a symbol of ideal leadership characteristics, such as social nobility, justice, solidarity, competence and strong influence. This study aims to answer the following two problems; 1) What is the understanding of political hadiths? 2) How is the interpretation of political hadith values through the paradigm of interconnection integration and the implications of its use? The research method used is qualitative with a library research approach, combining understanding with text analysis (*bayānī*), critical reasoning (*burhānī*), and contextual-spiritual (*'irfānī*). Using the integration-interconnection paradigm, this research seeks to connect these political values with the current socio-political reality, especially in Indonesia, which is rich in ethnic and cultural diversity. Translated with DeepL.com (free version).

The process of understanding hadith is done by using Yūsuf al-Qardāwī who offers eight steps in understanding hadith, but the author only uses five of the eight theories, namely: 1) Understanding the hadith in accordance with the Qur'anic instructions. 2) Collecting similar traditions. 3) Understanding the hadith by considering the background, situation, and conditions. 4) Distinguishing between changing means and permanent means. 5) Ascertaining the meaning and connotation of the words in the hadith. This method was chosen because it offers a comprehensive, contextual, and relevant approach by emphasising the understanding of the hadith in harmony with *maqāṣid al-shari'ah*, as well as answering contemporary problems about leadership.

The results of this study are as follows: The application of Yusuf al-Qardāwī's theory of *ma'ānil ḥadīṣ* to political hadith (Musnad al-Dārimī no. 2.563) regarding Quraysh leadership, emphasising a holistic understanding by integrating the hadith text with universal principles of the Quran such as justice, trustworthiness, and consultation, thereby determining Islamic leadership based on moral qualifications rather than tribal affiliation. This method distinguishes between *gāyah* (goal) in the form of criteria for competent and just leadership and *wasīlah* (means) that can change according to context, namely Quraish leadership. This shows that modern systems such as meritocracy-based democracy remain in line with the essence of hadith as long as they fulfil the basic principles of Islam. Additionally, this research demonstrates that the integration-interconnection paradigm can bridge the dichotomy in understanding political hadith by integrating normative, philosophical, and socio-historical dimensions. This paradigm offers a holistic solution in responding to contemporary political challenges, such as democratisation, human rights (HAM), and social justice. The integration-interconnection paradigm allows the values contained in this hadith to be applied contextually in various dimensions of modern life, such as educational, social, economic, cultural, environmental, emotional, and even spiritual aspects. Thus, it can be concluded that effective and legitimate leadership is not solely determined by ethnic background, lineage, or tribe, but rather by the qualities and character possessed by a leader, thereby fostering the creation of inclusive and just leadership in a multicultural society.

Keywords: Integration-Interconnection, Leadership, Political Hadith

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika sosial-politik dan perkembangan ilmu pengetahuan menjadikan relasi antara agama dan negara, khususnya dalam perspektif hadis politik sebagai kajian yang terus relevan. Politik sebagai ranah yang dinamis dan selalu berubah berhadapan dengan teks-teks keagamaan yang telah baku sejak 14 abad lalu. Islam sebagai agama komprehensif, tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip dasar dalam bernegara, termasuk konsep kepemimpinan, keadilan, dan musyawarah. Di Indonesia, ketegangan ini semakin nyata dengan maraknya fenomena politik dinasti dan politik identitas, di mana hadis-hadis tertentu sering diinstrumentalisasi untuk legitimasi kekuasaan atau mobilisasi massa.¹

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an memegang peranan penting dalam membentuk pandangan umat muslim, termasuk dalam ranah politik. Namun, dalam konteks kekinian, interpretasi terhadap hadis-hadis politik menghadapi sejumlah problematika serius. Fenomena politisasi agama dan penggunaan hadis untuk legitimasi kepentingan praktis semakin marak, menimbulkan distorsi makna dan penyempitan pemahaman. Selain itu, pendekatan tekstualis yang kaku, tanpa mempertimbangkan konteks sosio-historis menjadikan pemahaman terhadap hadis politik terkesan rigid dan tidak adaptif dengan realitas modern. Di sisi lain, muncul kesenjangan antara nilai-nilai yang terkandung dalam hadis politik (seperti konsep *khilafah*, baiat, dan kepemimpinan religius) dengan prinsip-prinsip demokrasi modern berbasis *nation-state*.² Sehingga hal ini memicu ketegangan antara kelompok literalis yang berpegang pada makna harfiah dan kelompok liberal yang menekankan reinterpretasi kontekstual.

Politik dinasti, politik identitas, dan narasi keagamaan yang menguat di era sekarang turut memperumit situasi. Sejumlah kelompok menggunakan hadis politik untuk membangun wacana otoritas keagamaan sekaligus mengesahkan agenda politik tertentu, seperti gerakan transnasional yang mengusung sistem *khilafah*. Sementara itu, sistem politik modern yang berbasis demokrasi, kedaulatan rakyat, dan pluralisme sering dianggap

¹ *Politik Kebangsaan: Studi Interpretasi Hadis-Hadis Politik*, <https://nu.or.id/pustaka/politik-kebangsaan-studi-interpretasi-hadis-hadis-politik-ShWSk>, accessed 3 Jun 2025.

² Devi Pramitha, "Kajian Tematis al-Qur'an dan Hadis tentang Kepemimpinan", *J-PAI*, vol. 3, no. 1 (2017), <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpai/article/view/3989>, accessed 3 Jun 2025.

bertentangan dengan tafsir literal hadis-hadis tertentu.³ Dominasi pendekatan tekstualis tanpa analisis historis-sosiologis berpotensi melanggengkan pemahaman yang eksklusif dan tidak toleran terhadap keragaman sistem politik.

Konflik pemahaman antara kelompok literalis dan liberal semakin memperlebar jurang perdebatan. Kelompok literalis cenderung mempertahankan makna otentik hadis politik tanpa kompromi, sementara kelompok liberal berargumen bahwa hadis-hadis tersebut harus dibaca dalam bingkai *maqāṣid al-syārī’ah* (tujuan syariat) dan realitas kekinian. Ketegangan ini tidak hanya terjadi di level akademik, tetapi juga memengaruhi kebijakan publik dan dinamika sosial-politik di berbagai negara muslim.⁴

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki sistem demokrasi yang unik di tengah dominasi negara-negara Barat dalam wacana demokrasi global. Keunikan ini terletak pada upaya bangsa Indonesia untuk memadukan nilai-nilai keislaman dengan prinsip kebangsaan yang inklusif, di mana Pancasila berperan sebagai *common platform* yang memayungi keberagaman agama, budaya, dan etnis. Namun, dalam praktiknya, relasi antara agama dan negara tidak selalu harmonis. Ketegangan kerap muncul, terutama ketika kelompok tertentu berusaha menggeser Pancasila dengan ideologi yang lebih eksklusif atau ketika pemahaman keagamaan yang literal bersinggungan dengan nilai-nilai kebangsaan.⁵

Salah satu tantangan besar dalam relasi agama-negara adalah maraknya fenomena radikalisme, politik dinasti, dan politik identitas yang memanfaatkan narasi keagamaan untuk kepentingan kekuasaan. Dalam konteks ini, hadis-hadis politik sering kali diinstrumentalisasi untuk membangun legitimasi gerakan tertentu, baik yang bersifat transnasional maupun lokal. Penggunaan hadis secara selektif dan tanpa konteks dapat memicu polarisasi sosial, menguatkan sentimen sektarian, dan bahkan mengancam kohesi nasional.⁶ Misalnya, pemaknaan sempit terhadap konsep khilafah atau *al-walā’ wa al-barā’* (loyalitas dan antipati berdasarkan agama) telah dimobilisasi oleh kelompok tertentu untuk menolak konsep *nation-state* yang menjadi fondasi Indonesia.

Di sisi lain, modernitas juga membawa tantangan tersendiri. Arus globalisasi dan digitalisasi mempercepat penyebaran paham-paham keagamaan yang radikal, sementara

³ Abd al-Matin Bin Salman, “Hadis Nabi Dalam Politik Kekuasaan: Studi Pemaknaan Hadis Nabi Perspektif Kekuasaan”, *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, vol. 6, no. 2 (2022), p. 471.

⁴ Indra Efendi and Charles Charles, “Politik Identitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis”, *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, vol. 1, no. 2 (2022), pp. 431–40.

⁵ alfatimah, “Memahami Nilai-Nilai Integratif Islam dan Pancasila”, *IAI Al-Fatimah Bojonegoro* (26 Oct 2023), <https://iai-alfatimah.ac.id/memahami-nilai-nilai-integratif-islam-dan-pancasila/>, accessed 3 Jun 2025.

⁶ Jeanie Annissa and Ricky Widyananda Putra, “Radikalisme Agama Dan Tantangan Identitas Nasional Di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1 (2022), pp. 1211–8.

keterbukaan demokrasi justru dimanfaatkan untuk menggalang dukungan politik berbasis identitas keagamaan. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pemahaman yang kontekstual dan substantif terhadap hadis politik dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketegangan agama-negara sekaligus memperkuat demokrasi Indonesia di tengah tantangan modernitas.⁷

Hadis politik mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan yang relevan sepanjang zaman. Namun, pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut seringkali terbatas pada interpretasi tekstual yang sempit, tanpa mempertimbangkan konteks sosio-historis dan perkembangan zaman. Hal ini berpotensi menimbulkankekakuan dalam penerapannya, padahal esensi hadis politik seharusnya mampu menjawab tantangan kontemporer, termasuk dalam sistem pemerintahan modern.⁸ Oleh karena itu, pendekatan kontekstual menjadi penting untuk mengungkap makna yang lebih dinamis dan aplikatif.

Dalam kapasitas Nabi Saw., sebagai pemimpin agama dan kepala negara (pemerintahan), beliau telah menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab tersebut. Diantaranya ialah membuat Undang-Undang tertulis, mencegah adanya konflik, mempersatukan penduduk Madinah yang bercorak heterogen untuk mencegah adanya konflik dan menjamin ketertiban dan perdamaian. Selain itu juga mengadakan perjanjian damai dengan negara tetangga agar terjamin ketertiban ekstern, menjamin kebebasan bagi semua golongan, menegakkan hukum bagi pelanggar hukum, mengorganisasikan pasukan militer dan memimpin peperangan. Demikian pula dengan memimpin musyawarah, hingga mengelola zakat dan pajak serta larangan melakukan riba untuk menjembatani jurang pemisah antara golongan kaya maupun miskin.⁹

Misalnya, hadis tentang kepemimpinan. Dimana hadis ini harus dibaca dan dipahami dalam konteks seseorang harus menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, mementingkan dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Contoh lain, tentang hadis yang memerintahkan untuk taat terhadap pemimpin. Pada masa Nabi Saw., sistem pemerintahan sangat sederhana dan seorang pemimpin diangkat berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Akan tetapi, jika dikonteksikan dengan saat ini dengan sistem demokrasi dan pemilihan umum (pemilu), maka upaya reinterpretasi dan kontekstualisasi menjadi penting agar ketaatan terhadap pemimpin tetap sesuai dengan koridor hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta hak-

⁷ Idrus Ruslan and Kiki Muhamad Hakiki, “Politik Identitas dan Tantangan Hubungan antar Agama di Indonesia”, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, vol. 17, no 2 (2022), <https://doi.org/10.24042/al-adyan.v17i2.14755>.

⁸ Wildan Fatoni Yūsuf and Hilmi Husaini Zuhri, “Telaah Hadis Kepemimpinan Quraisy Melalui Pendekatan Sosio-Historis”, *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies*, vol. 1, no. 2 (2023), pp. 197–213.

⁹ Tasmin Tanggareng, Zulfahmi, and Fathul Mujahidin Al-Anṣāry, “Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi Saw.”, *Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah*, vol. 1, no. 1 (2021), pp. 45–63.

hak asasi manusia.¹⁰ Persoalan politik dalam hadis mulai banyak dibahas pada masa Khalifah Alī ibn Abī Ṭālib. Namun, perlu dicatat bahwa kemungkinan hadis-hadis tentang politik sudah ada dan muncul sebelum masa tersebut. Ini didasari fakta bahwa perselisihan politik di kalangan umat Muslim sudah terjadi sejak Nabi Muhammad Saw., wafat.

Hal ini dilakukan antara kaum *Anṣār* dengan kaum *Muhājirīn*, Dimana kedua kelompok tersebut saling memperebutkan kekuasaan atau kendali kepemimpinan sepeninggalan Nabi Saw., Sehingga, muncul dalam catatan bahwa sedikit adanya gesekan antara golongan *Muhājirīn* dan *Anṣār*. Masing-masing dari mereka berpendapat bahwa yang berhak menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin politik dan pemerintahan ialah dari golongan mereka.¹¹ Kaum *Muhājirīn* yang berlandaskan pada hadis Nabi menyatakan bahwa kelompok Quraisy lebih berhak memimpin umat dari pada yang lainnya. Mereka juga melakukan penutupan ruang bagi kelompok lain yang ingin berkontribusi dalam memberikan pelayanan terhadap umat. Sedangkan golongan *Anṣār* lebih dahulu untuk melakukan suskesi dengan berencana mengangkat Sa'ad ibn 'Ubādah. Mereka berkumpul di suatu tempat yang bernama *Tsaqīfah Banī Sā'idah*. Kemudian, rencana tersebut diketahui oleh golongan *Muhājirīn* yang dipimpin oleh Abū Bakr, 'Umar, dan Abū 'Ubāidah. Akan tetapi, sebuah ide cemerlang datang dari 'Umar ibn Khattab, dimana ia mengajak umat muslim untuk memilih Abū Bakr secara aklamasi dengan diplomasi yang menggunakan pendekatan *lobbying* sehingga mampu melunturkan hati golongan *Anṣār* yang masih bersikukuh dengan anggapan pemimpin dari golongan mereka.¹²

Hubungan politik di kalangan sahabat pada masa awal kepemimpinan Islam, yang meliputi era Abū Bakar, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, Alī ibn Abī Ṭālib, hingga Mu'awiyah ibn Abī Sufyān, diwarnai oleh berbagai konflik, baik berupa kekerasan fisik maupun perbedaan pandangan. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada peristiwa tahkim, yang mengakibatkan terpecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan: pendukung Alī (Syi'ah), pendukung Mu'awiyah, Khawārij, dan *Jumhūr al-Muslimīn* (majoritas umat Islam). Masing-masing kelompok ini cenderung memuja pemimpin dan pengikutnya sendiri, sekaligus mencela pemimpin dan kelompok lain, seringkali dengan memanfaatkan dalil-dalil agama untuk memperoleh dukungan dan pemberanakan di mata publik..¹³

¹⁰ Raodatul Jannah, "Hadis tentang Politik", *Jurnal Riset Agama*, vol. 1, no. 1 (2021), pp. 119–32.

¹¹ Imam Mustofa, "Memahami Hadits Kepemimpinan Dari Bangsa Quraisy dan Relevansinya Dengan Konsep Kepemimpinan Kontemporer", *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, vol. 14, no. 2 (2020), pp. 271–92.

¹² Mila Melyani, "Pemahaman Hadis Kepemimpinan Quraisy: Studi Komparatif Tipologi Kepemimpinan Quraisy Dengan Tipologi Kepemimpinan Di Indonesia", *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, vol. 4, no. 2 (2020), pp. 175–82.

¹³ Mustofa, "Memahami Hadits Kepemimpinan Dari Bangsa Quraisy dan Relevansinya Dengan Konsep Kepemimpinan Kontemporer".

Dalam perkembangannya, problematika interpretasi hadis politik telah menjadi tantangan serius dalam diskursus pemikiran kontemporer. Pendekatan tekstualis yang cenderung kaku dalam memahami hadis, seringkali menghasilkan interpretasi yang tidak selaras dengan perkembangan zaman dan kompleksitas sistem politik modern. Kecenderungan tekstualis ini muncul dari paradigma pemahaman hadis yang mengabaikan konteks historis, sosiologis, dan antropologis saat hadis tersebut disampaikan oleh Nabi Saw.,¹⁴

Hadis tentang kepemimpinan Quraisy, misalnya, kerap dipahami secara tekstual sebagai pemberian dominasi kelompok tertentu dalam politik, padahal konteks historisnya lebih menekankan pada kapabilitas dan stabilitas pemerintahan.¹⁵ Problematika serupa terjadi dalam fenomena politik dinasti di Indonesia, di mana kekuasaan cenderung diwariskan dalam lingkaran keluarga atau kelompok elite, seperti yang terlihat dalam sejumlah kepemimpinan daerah maupun nasional. Di sisi lain, politik identitas menguat dengan penggunaan narasi agama untuk membangun dukungan, seperti dalam Pemilu 2024, di mana isu keislaman, politik dinasti, dan sentimen primordialisme dimanfaatkan untuk memengaruhi preferensi pemilih. Selain itu, fenomena politik identitas semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir, menandakan pergeseran dalam dinamika sosial-politik masyarakat.¹⁶ Survei Litbang Kompas mengungkapkan bahwa sekitar 60% responden mengakui bahwa agama memengaruhi pilihan politik mereka.¹⁷ Temuan ini menunjukkan bahwa identitas keagamaan tidak hanya berperan dalam ranah spiritual, tetapi juga menjadi faktor signifikan dalam menentukan preferensi politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana nilai-nilai agama, termasuk teks-teks keagamaan seperti hadis, digunakan sebagai instrumen politik untuk membangun narasi dan mobilisasi massa

Perubahan sistem politik modern, seperti demokrasi, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan prinsip *good governance*, menuntut reinterpretasi terhadap hadis-hadis politik agar tetap relevan. Misalnya, konsep musyawarah dalam hadis tidak bisa hanya dipahami dalam kerangka tradisional, melainkan perlu diselaraskan dengan mekanisme demokrasi modern yang melibatkan partisipasi publik dan akuntabilitas.¹⁸ Tanpa

¹⁴ Moh. Tamimi, “Implementasi Hadis Dalam Hukum Sosial dan Politik”, *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, vol. 2, no. 1 (2020), pp. 105–23.

¹⁵ Tangngareng, Zulfahmi, and Al-Anṣārī, “Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi Saw.”

¹⁶ Tumpal Daniel S, “Pilpres 2024: Pupulisme Islam dan Politik Identitas”, *Alasma | Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, vol. 3, no. 2 (2023).

¹⁷ Andreas Yoga Prasetyo/Litbang Kompas, “Survei ‘Kompas’: Mayoritas Publik Apresiasi Kinerja Politik-Keamanan Pemerintah”, *kompas.id* (19 Feb 2023), <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/02/19/survei-kompas-majoritas-publik-apresiasi-kinerja-politik-keamanan-pemerintah>, accessed 3 Jun 2025.

¹⁸ *Menuju Politik yang Berkeadaban dalam Islam*, <https://www.nu.or.id/pustaka/menuju-politik-yang-berkeadaban-dalam-islam-DpkgI>, accessed 3 Jun 2025.

penafsiran yang kontekstual, hadis politik berisiko dianggap usang atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai modern, padahal ia dapat menjadi landasan etis bagi penguatan sistem politik yang berkeadilan.

Kasus-kasus konflik sosial di berbagai daerah, seperti Papua dan Aceh, memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh agama dalam pengambilan keputusan politik. Di Aceh, misalnya, penerapan syariat Islam tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga memengaruhi kebijakan publik dan sikap politik masyarakat.¹⁹ Sementara itu, di Papua, meskipun konflik lebih banyak dilatarbelakangi oleh isu separatisme dan ketimpangan ekonomi, sentimen keagamaan juga kerap dimanfaatkan untuk memperuncing polarisasi.²⁰ Dalam konteks ini, hadis dan doktrin agama lainnya sering kali dikutip untuk membenarkan tindakan atau kebijakan tertentu, baik oleh elit politik maupun kelompok masyarakat.

Penggunaan hadis sebagai rujukan politik tidak lepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang religius namun heterogen. Di satu sisi, mayoritas penduduk Indonesia memeluk Islam dan menjadikan hadis sebagai salah satu sumber nilai dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, interpretasi terhadap hadis sering kali bervariasi, tergantung pada kepentingan dan perspektif kelompok tertentu. Hal ini menciptakan ruang bagi politisasi teks keagamaan, di mana hadis bisa digunakan untuk mendukung narasi inklusif maupun eksklusif, tergantung pada aktor yang menggunakannya.²¹ Dengan demikian, politik identitas berbasis agama, termasuk penggunaan hadis dalam wacana politik, menjadi fenomena yang perlu dikaji lebih mendalam. Studi ini berupaya mengeksplorasi bagaimana hadis dipahami dan dimanfaatkan dalam konteks politik lokal, serta dampaknya terhadap kohesi sosial di Indonesia.

Tentu, ini parafrase dari teks tersebut: Para pemikir Islam berpandangan bahwa tindakan politik seharusnya selalu berlandaskan pada nilai, etika, dan norma agama yang bersifat Ilahi. Oleh karena itu, setiap individu maupun kelompok wajib mewujudkan nilai-nilai tersebut. Alam semesta diibaratkan sebagai kekayaan bersama yang menyatukan Tuhan dan manusia dalam hubungan yang tak terpisahkan. Terlebih lagi, tujuan utama pembentukan negara adalah untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang perbedaan ras, suku, budaya, atau agama.²² Menurut Miftah Arif Setyawan dan rekan-rekan dalam jurnal mereka "Urgensi Etika Islam dalam Politik

¹⁹ Firdaus M. Yunus, Azwarfajri Azwarfajri, and Muhammad Yūsuf, "Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh", *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, vol. 17, no. 1 (2023), pp. 181–92.

²⁰ Faisal Faisal, Zulfadli, and Fajrul Ramadan Puarada, "Resolusi Konflik Perebutan Mayat: Negosiasi Antaragama di Sentani, Papua", *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, vol. 5, no. 2 (2024), pp. 158–78.

²¹ Bin Salman, "Hadis Nabi Dalam Politik Kekuasaan".

²² Haedar Nashir, "Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer", *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, vol. 1, no. 1 (2017), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1209>, accessed 3 Jun 2025.

Kontemporer", Imam al-Ghazālī (w. 505 H) berpendapat bahwa manusia secara inheren membutuhkan interaksi sosial, sebuah konsep yang ia sebut sebagai teori "saling bergantung". al-Ghazālī menegaskan bahwa prinsip ketergantungan ini tidak hanya berlaku bagi individu sebagai makhluk sosial, tetapi juga relevan bagi negara, yang juga membutuhkan hubungan dengan negara lain.²³

Namun demikian, interpretasi hadis-hadis politik seringkali terjebak dalam sebuah pendekatan yang kurang mempertimbangkan konteks sosio-historis, serta perkembangan zaman. Pemahaman tekstual semacam ini tidak jarang menimbulkan kesenjangan antara ideal moral yang terjandung dalam hadis dengan realitas politik kontemporer. Problematika ini semakin kompleks ketika hadis-hadis politik diinterpretasikan secara parsial tanpa mempertimbangkan interkoneksi dengan berbagai disiplin ilmu modern, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Akibatnya, muncul berbagai interpretasi yang justru dapat memicu konflik dan ketegangan dalam kehidupan politik praktis.

Dalam konteks kekinian, interpretasi hadis politik seringkali menghadapi dilema antara pendekatan tekstual yang cenderung rigid dengan pendekatan kontekstual yang terkadang dianggap terlalu liberal. Kecenderungan sebagian kelompok untuk memahami hadis secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosio-historis dan realitas kontemporer telah melahirkan pemahaman yang tidak relevan, bahkan kontraproduktif dengan semangat demokrasi atau nilai-nilai kemanusian yang universal.²⁴ Di lain sisi, interpretasi teks keagamaan yang terlalu longgar tanpa meperhatikan prinsip metodologis dalam memahami hadis, berisiko untuk menjauhkan hasil penafsiran dari maksud dan tujuan hadis tersebut.

Paradigma integrasi-interkoneksi yang digagas oleh M. Amin Abdullah, seorang Profesor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, merupakan bukti kemajuan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini bertujuan menghilangkan pembagian atau pemisahan antar disiplin ilmu, karena pada dasarnya setiap ilmu saling membutuhkan dan melengkapi.²⁵ Melalui paradigma integrasi-interkoneksi, Amin Abdullah menawarkan tiga pendekatan utama, yakni *hadārah al-nās* (budaya teks), *hadārah al-‘ilm* (budaya ilmu), dan *hadārah al-falsafah* (budaya filsafat).²⁶ Dengan kerangka ini, hadis politik tidak dibaca secara isolatif, tetapi

²³ Miftah Arif Setyawan et al., "Urgensi Etika Islam dalam Politik Kontemporer", *Aksioreligia*, vol. 2, no. 2 (2024), pp. 56–64.

²⁴ Abdul Haq Syawqi and Muhammad Khatibul Umam, "Nuansa Politik dalam Memahami Hadis: Analisa Metodologis-Historis", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, vol. 7, no. 2 (2021), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah/article/view/9421/pdf>.

²⁵ Dewi Masyitoh, "Amin Abdullah dan Paradigma Integrasi-Interkoneksi", *JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora)*, vol. 4, no. 1 (2020), p. 81.

²⁶ Amin Abdullah, *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkoneksi dalam Kajian Pendidikan Islam*, ed. by H. Maragustam (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014).

didiologkan dengan teori politik modern, seperti demokrasi, *good governance*, dan HAM. Misalnya, konsep syura (musyawarah) dalam hadis bisa dikontekstualisasikan dengan mekanisme *checks and balances* dalam demokrasi, sementara prinsip keadilan pemimpin (imamah) dapat dihubungkan dengan pemberantasan korupsi.

Pendekatan integrasi-interkoneksi dalam studi hadis politik memungkinkan terjadinya dialog yang produktif antara ilmu-ilmu keislaman tradisional dengan ilmu modern. Melalui pendekatan ini, pemahaman hadis tidak lagi terkungkung dalam ibn gkai tekstual semata, melainkan diperkaya dengan perspektif ilmu sosial, poltik, antropologi, dan disiplin keilmuan lainnya. Hal ini memungkinkan lahirnya interpretasi yang lebih komprehensif dan kontekstual, yang mampu merespons dinamika politik kontemporer tanpa kehilangan pijakan pada nilai-nilai fundamental Islam. Selain itu, paradigma integrasi interkoneksi juga membuka ruang bagi pengembangan metodologi pemahaman hadis yang lebih dinamis dan responsif. Pendekatan tersebut tidak hanya mendialogkan antara berbagai disiplin keilmuan, namun juga mendorong terciptanya sintesis kreatif yang dapat melahirkan pemahaman baru sesuai dengan konteks kekinian.

Dalam konteks agama (hadis) dan politik, pendekatan integrasi-interkoneksi dapat diintegrasikan melalui nilai-nilai hadis dengan teori politik dan pemerintahan kontemporer, seperti demokrasi, tatanegara, dan *good governance*. Sementara itu, interkoneksi dapat dibangun dengan mengaitkan interpretasi nilai-nilai hadis politik dengan isu-siu aktual terkait politik dan pemerintahan di era modern, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, radikalisme, dan sebagainya.²⁷ Selain itu, paradigma integrasi juga memungkinkan dalam menginterpretasikan nilai-nilai hadis poltik secara komprehensif dan kontekstual dengan mengakomodasi perspektif klasik dan kontemporer.

Mengutip artikel yang ditulis oleh Rizqi Shohibul dan Reza Saputra, Imam al-Ghazālī juga menegaskan, bahwa kepemimpinan politik merupakan tata nilai atau sistem yang diusung untuk sebuah kemaslahatan yang besar, dikarenakan mencakup seluruh aspek kehidupan sebuah bangsa, berupa norma, bahasa, agama, seni, maupun budaya.²⁸ Dengan demikian, posisi pemimpin menjadi penentu dalam menjamin pengalaman pelajaran dan menciptakan keteraturan, ketertiban, serta perdamaian. Sosok pemimpin juga harus mempunyai kekuatan untuk menggerakkan dan memajukan umat, bahkan tidak

²⁷ Muhammad Nur, *Integrasi-Interkoneksi Agama dan Politik*, vol. 5, no. 1 (2015).

²⁸ Rizqi Shohibul Khotami and M. Reza Saputra, “Pemahaman Hadis Al-Ghazālī tentang Menasihati Pemimpin: Studi Kasus Pejabat Negara di Indonesia”, *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, vol. 5, no. 3 (2024), pp. 202–16.

diperbolehkan untuk mementingkan kepentingan pribadi dan tidak boleh mengambil apa yang bukan menjadi haknya.

Namun, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kepemimpinan itu yang pantas ialah orang Quraisy. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., dalam *Musnad al-Dārimī* No. 2.563 yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعْبِيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعَمٍ، يُحَدَّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَذْدَهُ فِي وَقْدٍ مِّنْ قُرْيَشٍ إِلَيْيَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرْيَشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَفَاقُوا لِيَّا²⁹

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami, al-Hakam ibn Nāfi’ dari Syu’āib ibn Abī Hamzah dari al-Zuhri, ia berkata: Muḥammad ibn Jubair ibn Muṭh’im menceritakan dari Mu’āwiyyah bahwa ia berata; sedangkan dirinya berada di antara para delegasi orang-orang Quraisy “Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda: “Sesungguhnya perkara kekhilafahan ini ada pada orang-orang Quraisy, tidak ada seorang pun yang menentang mereka kecuali Allah SWT., Menghinakannya selama mereka menegakkan agama ini.”³⁰

Hadis yang disebutkan mengindikasikan bahwa hanya orang Quraisy yang berhak menangani masalah kepemimpinan atau kekhalifahan. Namun, pemahaman hadis ini harus didahului dengan peninjauan konteks historisnya. Penting untuk mengkaji apakah hadis tersebut memang harus dipahami secara harfiah sesuai pernyataannya, serta bagaimana pemahaman dan penerapannya relevan dalam kehidupan sehari-hari di era modern ini. Pernyataan Nabi Muhammad Saw., dalam hadis mengenai kriteria pemimpin memerlukan kajian mendalam. Sebagai teladan yang baik (*Uswatun Hasanah*) dan tokoh revolusioner dalam peradaban manusia, Nabi tidak mungkin mengeluarkan perintah atau larangan tanpa tujuan yang jelas. Semua perkataan beliau pasti memiliki maksud dan alasan yang kuat, yang tidak terlepas dari realitas objektif pada masa itu.

Indonesia berhasil menciptakan hubungan yang harmonis antara agama dan negara. Agama memerlukan dukungan negara untuk menyebarkan nilai-nilai ajarannya, sementara negara mengandalkan agama dalam membentuk etika dan moral masyarakat yang beragam. Menariknya, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memilih untuk tidak menjadikan Islam sebagai dasar konstitusionalnya.³¹ Akan tetapi, nilai-nilai yang diterapkan tersebut tidak keluar dari nilai-nilai agama. Sehingga hal ini yang menjadikan

²⁹ Abū Muḥammad ’Abdullāh ibn ’Abd al-Raḥmān ibn al-Faḍl ibn Baḥrām ibn ’Abd as-Šamad at-Tamīmī ad-Dārimī as-Samarqandī, *Sunan al-Dārimī al-Hadīṣ al-Marfū’ wa al-Mawqūf wa al-Maqṭū’*, vol. 3 (Riyadh: Dār al-Mughnī li an-Nashr wa at-Tawzī’ al-Mamlakah al-’Arabiyyah as-Sa’ūdiyyah, 1412), p. 1.639, juz 3, no. 2.563.

³⁰ Terjemahan diambil dari Home Sweet Home, *Aplikasi Hadis Soft* (1440). Dalam aplikasi ini terdapat 14 kitab hadis yang terdiri dari *al-Kutub al-Tis’ah* dan Beberapa Kitab Hadis Lain seperti *Sunan al-Dāraqutnī*, *Šaḥīḥ ibn Khuzaymah*, *Šaḥīḥ ibn Ḥibbān*, *Al-Mustadrak* dan *Musnad al-Syāfi’ī*.

³¹ Ahmad Sadzali, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi”, *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 2 (2020), pp. 341–75.

Indonesia sebagai representasi negara muslim yang dapat memberikan hubungan baik antara agama dan negara.

Sama seperti yang terjadi sebelumnya, Indonesia sudah dua kali mengadakan pemilihan umum besar-besaran (pemilu) di tahun 2019 dan 2024. Saat pemilihan presiden, ada saja pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi untuk berbuat curang, menggunakan agama untuk kepentingan politik, memecah belah umat beragama, bahkan bersikap tidak toleran terhadap perbedaan. Semua ini mereka lakukan agar bisa mendapatkan kekuasaan. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa hal-hal seperti ini bisa terus terjadi. Masih ada kemungkinan munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk tujuan politik, contohnya seperti aksi 212 dan gerakan serupa. Ini menunjukkan bagaimana ajaran agama bisa disalahgunakan atau dipelintir demi kepentingan tertentu.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang hadis politik maupun paradigma integrasi-interkoneksi secara terpisah, masih dapat gap penelitian yang perlu diisi, khususnya dalam mengaplikasikan paradigma integrasi-interkoneksi secara sistematis dalam interpretasi hadis-hadis politik. Berbagai penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek teoritis paradigma integrasi-interkoneksi atau pada kajian teoritis paradigma tersebut, maupun kajian hadis pada umumnya. Namun, belum banyak yang mengkaji secara mendalam bagaimana paradigma ini dapat dioperasionalkan dalam memahami hadis-hadis politik secara kontekstual. Maka, gap inilah yang menjadi fokus penelitian ini, dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan metodologi pemahaman hadis politik yang lebih komprehensif.

Selain itu, urgensi penelitian ini terletak pada dua hal. *Pertama*, sebagai respons terhadap politisasi hadis politik yang mengancam kohesi sosial Indonesia. *Kedua*, untuk mengisi kekosongan akademik dengan menawarkan model interpretasi hadis politik yang kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan metodologi studi hadis, tetapi juga menjadi solusi praktis bagi problem politik kontemporer, seperti politik dinasti yang mengikis meritokrasi atau politik identitas yang memecah belah masyarakat. Maka penulis bermaksud untuk melakukan sebuah kajian tentang studi hadis guna disusun menjadi sebuah skripsi dengan judul **“INTERPRETASI NILAI-NILAI HADIS POLITIK MELALUI PARADIGMA INTEGRASI INTERKONEKSI”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belaknag di atas, agar penelitian ini terfokus pada permasalahan yang hendak dikaji, maka penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman tentang hadis-hadis politik dengan menggunakan teori *Ma'ānil hadīś Yūsuf al-Qardāwī*?
2. Bagaimana korelasi nilai-nilai hadis politik melalui paradigma integrasi-interkoneksi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama di atas. Maka, berangkat dari problematika tersebut, tujuan penelitian ini mencakup hal sebagai berikut:

- a. Menjelaskan pemahaman tentang hadis-hadis politik dengan menggunakan teori *ma'ānil hadīś Yūsuf al-Qardāwī*.
- b. Menjelaskan korelasi nilai-nilai hadis politik melalui paradigma integrasi-interkoneksi.

2. Manfaat

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan kegiatan dalam rangka sumbangsih akademik dan keilmuan dalam studi hadis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan sebagai tambah khazanah keilmuan dalam topik hadis dan politik.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan seputar hadis tentang integrasi-interkoneksi agama dan politik, khususnya hadis dan politik. Di lain sisi, penelitian ini diharapkan memberikan dukungan moral kepada para pemimpin dalam upaya menginterpretasi nilai-nilai hadis dalam berpolitik.
- c. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan edukasi dan pemahaman perihal berpolitik, sekaligus dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para pengkaji hadis.
- d. Selain itu, penelitian ini sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar S1 (Strata Satu) dalam Program Studi Ilmu Hadis.

D. Tinjauan Pustaka

Secara umum penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini memfokuskan terhadap interpretasi nilai-nilai hadis politik sebagai objek formal dan paradigma integrasi interkoneksi sebagai objek material yang didukung dengan berbagai data yang diperoleh dari buku dan artikel penelitian ilmiah baik berupa jurnal, skripsi, ataupun tesis.³² Maka, untuk membedakan pemetaan dan arah penelitian sebelumnya diperlukannya tinjauan pustaka.

³² “Metode Penelitian Kepustakaan - Penerbit Litnus -”, *Penerbit Litnus*, <https://penerbitlitnus.co.id/product/metode-penelitian-kepustakaan/>, accessed 4 Jun 2025.

Diantara kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan memaparkan dengan mengkategorisasikan menjadi tiga bagian data, yakni *pertama*, pemaparan data penelitian tentang pemaknaan dan pemahaman hadis-hadis politik. *Kedua*, pemaparan data penelitian tentang paradigma integrasi-interkoneksi. *Ketiga*, pemaparan data penelitian tentang integrasi-interkoneksi dalam studi hadis. Berikut pembagian atas pemaparan tinjauan pustaka terkait:

1. Pemaknaan dan Pemahaman Hadis-Hadis Politik

Pertama, buku yang berjudul “Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan” yang ditulis oleh Lukman Arake pada tahun 2020.³³ Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang hadis-hadis politik dan pemerintahan. Penelitian ini membahas bagaimana kekayaan pemikiran Islam yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. berkaitan dengan masalah politik dan pemerintahan. Topik ini selalu menarik perhatian, jadi tidak heran jika dari dulu hingga sekarang, para ulama selalu menggunakan hadis dalam karya-karya penting mereka. Selain itu, dalam karya tersebut juga membicarakan berbagai hal yang relevan terkait hadis dengan masalah politik dan pemerintahan.

Kedua, skripsi yang berjudul “Memahami Hadis Kepemimpinan Quraisy” yang ditulis oleh Hari Putra Z, mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2018.³⁴ Metode penelitian yang digunakan berupa studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data primer yang digunakan merupakan hadis tentang kepemimpinan Quraisy dalam *Sahīh Bukhārī* juz IX halaman 217 dan sumber data sekunder yang digunakan berasal dari artikel ilmiah berupa jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan pemimpin.

Ketiga, artikel jurnal yang berjudul “Hadis tentang Politik” ditulis oleh Raodatul Jannah pada tahun 2021.³⁵ Penelitian ini mengkaji pandangan hadis tentang politik. Metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan menelaah berbagai literatur (studi pustaka) dan menganalisis isinya. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup dua hal utama: bagaimana pandangan umum hadis terhadap politik, dan bagaimana hukum kepemimpinan politik bagi perempuan menurut hadis. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hak berpolitik tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja, sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk berpolitik. Namun, sebagian ulama juga melarang perempuan untuk berpolitik.

³³ Dr. Lukman Arake, Lc. MA., *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan*, 1st edition (Yogyakarta: CV. Lintas Nalar, 2020).

³⁴ Hari Putra Z, “Memahami Hadis Kepemimpinan Quraisy” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

³⁵ Jannah, “Hadis tentang Politik”.

Keempat, artikel jurnal yang berjudul “Memahami Hadis Kepemimpinan dari Bangsa Quraisy dan Relevansinya dengan Konsep Kepemimpinan Kontemporer” ditulis oleh Imam Musthofa pada tahun 2020.³⁶ Penelitian ini meneliti pandangan Imam al-Ghazālī tentang memberi nasihat kepada pemimpin, dan bagaimana pandangan tersebut masih relevan dengan kondisi kepemimpinan di Indonesia saat ini. Kami menggunakan metode kualitatif, khususnya studi kasus, untuk mengumpulkan data dari karya al-Ghazālī, kasus-kasus korupsi pejabat di Indonesia, dan wawancara dengan para ahli. Data kemudian dianalisis untuk menemukan konsep utama dari ajaran al-Ghazālī dan tema-tema penting dari kasus nyata. Untuk memastikan keakuratan, kami membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode.

2. Paradigma Integrasi Interkoneksi

Pertama, tesis yang berjudul “Integrasi Agama dan Politik (Tela’ah Pemikiran Hamka terhadap Ayat-Ayat Politik dalam Tafsir al-Azhar)” yang ditulis oleh Mismubarak, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta pada tahun 2019.³⁷ Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pemikiran Hamka dengan metode analisis ayat-ayat yang berkaitan dengan tema-tema politik. Hal tersebut terlihat dari pemikiran Hamka, bahwa al-Qur'an sendiri tidak menghendaki adanya pemisahan antara agama dan negara, keduanya sangatlah saling menyempurnakan. Penelitian tersebut dilakukan secara kepustakaan (*library research*) dengan membaca, mempelajari, dan menelaah secara kritis terkait hubungan antara agama dan politik dari Tafsir al-Azhar yang kemudian dikorelasikan dengan pemikiran ulama kontemporer.

Kedua, artikel jurnal yang berjudul “Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkoneksi M. Amin Abdullah dan Implementasinya dalam Keilmuan Islam” oleh Atika Yulanda pada tahun 2019.³⁸ Penelitian ini dilakukan untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan yang diusulkan oleh Amin Abdullah, yaitu integrasi dan interkoneksi. Diharapkan, hasil penelitian ini bisa menjadi landasan untuk menganalisis berbagai fenomena sosial, khususnya di masyarakat Islam, dari sudut pandang filosofis. Jenis penelitian yang digunakan ialah *library research* yang dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah, baik berupa buku, majalah, jurnal, makalah, dan berbagai media yang mengulas topik penelitian.

³⁶ Mustofa, “Memahami Hadits Kepemimpinan Dari Bangsa Quraisy dan Relevansinya Dengan Konsep Kepemimpinan Kontemporer”.

³⁷ Mismubarak, “Integrasi Agama dan Politik (Tela’ah Pemikiran Hamka terhadap Ayat-Ayat Politik dalam tafsir al-Azhar)” (Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2019).

³⁸ Atika-Yulanda, “Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkoneksi M. Amin Abdullah dan Implementasinya dalam Keilmuan Islam”, *TAJID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol. 18, no. 1 (2020), pp. 79–104.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi primer dan sekunder. Sumber primer didapatkan melalui sumber pertama dan sekunder berupa karya lain yang membahas terkait tentang epistemologi keilmuan integrasi interkoneksi serta karya-karya lainnya.

Ketiga, buku yang berjudul “Implementasi Pendekatan Integratif-Interkoneksi dalam Kajian Islam” ditulis oleh Amin Abdullah pada tahun 2014.³⁹ Buku ini merupakan hasil dari berbagai penelitian yang berfokus pada kajian integrasi-interkoneksi Pendidikan Islam (pemikiran Islam, Pendidikan agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, dan bimbingan konseling Islam). Namun, tinjauan pustaka ini befokus pada tulisan Amin Abdullah “*Fresh Ijtihad* memperjumpakan ‘Ulūm al-Dīn dan Sains Modern dalam Pemikiran Pendidikan Islam”. Tulisan tersebut menguraikan berbagai komponen, elemen, atau topik yang penting untuk dibahas dalam pemikiran pendidikan sosial keislaman di era kontemporer. Tujuannya adalah agar gagasan-gagasan ini dapat berkontribusi dalam membentuk karakter umat dan bangsa. Lebih lanjut, tulisan ini juga menekankan bagaimana cara berpikir, sudut pandang, dan pendekatan terhadap setiap elemen yang disebutkan tadi saling terkait dan terintegrasi. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing elemen dapat membentuk suatu jaringan dan proses berpikir keagamaan Islam yang menyeluruh dan utuh.

Keempat, artikel jurnal yang berjudul “Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah” ditulis oleh M. Afiqul Adib pada tahun 2022.⁴⁰ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengertian pendekatan normatif dan historis, serta hubungan antara keduanya dalam studi Islam. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *library research* yang kemudian digunakan deskriptif untuk memberikan Gambaran utuh dan terstruktur. Sehingga, dapat dilakukan pengolahan data secara procedural dan teliti untuk mendapatkan hasil yang valid. Hasil temuannya menunjukkan, bahwa paradigma integrasi-interkoneksi yang digagas oleh Amin Abdullah ialah salah satu upaya mendialogkan Islam normatif dan Islam historis dalam kajian pemikiran Islam.

3. Integrasi Interkoneksi dalam Studi Hadis

Pertama, artikel jurnal yang berjudul “Integrasi Interkoneksi dalam Studi Hadis Disertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” ditulis oleh Fadhl Lukman pada tahun

³⁹ Amin Abdullah, *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkoneksi dalam Kajian Pendidikan Islam*.

⁴⁰ M. Afiqul Adib, “Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah”, *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 7, no. 2 (2022), p. 87.

2017.⁴¹ Penelitian ini mengkaji penerapan paradigma integrasi interkoneksi di UIN Sunan Kalijaga, khususnya dalam disertasi studi hadis. Hasilnya menunjukkan bahwa sembilan dari empat belas disertasi yang ditinjau menggunakan cara pandang yang akarnya berasal dari tradisi Barat sejak abad ke-18.

Kedua, artikel berupa jurnal yang berjudul “Pemahaman Hadis tentang Covid-19 dalam Perspektif Integrasi Interkoneksi Amin Abdullah” ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga pada tahun 2020.⁴² Sebagaimana perkembangan kajian tematik dalam studi Islam, bahan kajian ini diperoleh melalui pencarian data model *takhrīj al-hadīṣ*. Model ini dilakukan menggunakan kata-kata tertentu dalam hadis yang kemudian ditelusuri dalam sebuah kitab syarah yang berisikan seputar hadis tersebut. Kemudian, penejelasan tersebut dipahami dengan melibatkan keilmuan yang berkembang, yakni paradigm integrasi interkoneksi yang digagas oleh Prof. Amin Abdullah dalam memberikan pemahaman kontekstual.

Ketiga, artikel berupa jurnal yang berjudul “Perkembangan Model Integrasi Pendidikan dalam Hadis dan Penerapan” ditulis oleh Elvi Yenti dkk. pada tahun 2022.⁴³ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan model integrasi pendidikan dalam hadis dan penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan ialah *literature review*. Berdasarkan literatur yang dikumpulkan didapatkanlah bahwa sumber ilmu yang mutlak ialah al-Qur'an dan Hadis. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi, serta teknik analisis yang digunakan ialah analisis isi.

Adapun beberapa penelitian di atas yang telah dicantumkan mempunyai ciri dan ranahnya masing-masing. Beberapa di antaranya telah menyinggung penelitian tentang hadis dan politik, dan penelitian tentang integrasi dan interkoneksi. Akan tetapi, dalam penelitian ini berupaya bagaimana untuk mengaplikasikan paradigma integrasi-interkoneksi dalam interpretasi hadis-hadis politik. Melihat berbagai penelitian yang cenderung fokus pada aspek teoritis maupun kajian hadis pada umumnya. Sehingga, penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana paradigma tersebut diperasionalkan terhadap hadis.

⁴¹ Fadhli Lukman, “Integrasi-Interkoneksi dalam Studi Hadis Disertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *RELIGIA*, vol. 19, no. 2 (2017), p. 1.

⁴² Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Pemahaman Hadis tentang Covid-19 dalam Perspektif Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah”, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 18, no. 2 (2020), p. 173.

⁴³ Elvi Yenti, Ilyas Husti, and Nurhadi Nurhadi, “Perkembangan Model Integrasi Pendidikan dalam Hadist dan Penerapan”, *At-Tajdid : Journal of Islamic Studies*, vol. 2, no. 2 (2022), p. 48.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep dasar atau rancangan yang berisi pemaparan segala bentuk atau hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Kerangka teori disusun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan literatur yang relevan. Dengan kata lain, kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan peneliti untuk membangun argumen, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dalam penelitian.⁴⁴ Kerangka teori tersebut, pandangan, pendapat, dan konsep dirangkai menjadi kerangka acuan awal terkait dengan masalah yang diteliti harus sesuai dengan masalah yang dibahas untuk membentuk hipotesis atau model yang dapat diuji. Kemudian menggunakan kajian yang relevan dengan melihat tulisan terdahulu yang memuat informasi tentang kajian serupa sebelumnya, seperti jurnal, skripsi, tesis, buku, dan laporan penelitian. Tujuan dari penelitian sebelumnya guna menempatkan penelitian saat ini di bawah penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi.⁴⁵

1. Teori *Ma'ānil Hadīs* (Interpretasi Nilai-Nilai Hadis Politik)

Dalam upaya memahami suatu teks (matan) hadis diperlukannya seperangkat keilmuan atau metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini dalam satua kerangka teori yang digunakan ialah menggunakan teori yang telah diletakkan oleh ulama khalaf yang berjiwa modernis, yakni Yūsuf al-Qardāwī.

Yūsuf al-Qardāwī merupakan sosok ulama dan cendekiawan muslim dunia yang pernah menjadi ketua Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional. Beliau dilahirkan di desa Saft Turab Provinsi Barat, Mesir pada 9 September 1926 M. Nama lengkapnya ialah Muhammad Yūsuf al-Qardāwī. Namun, beliau telah meninggal dalam usia yang ke-96 tahun. Selain itu, beliau juga termasuk salah satu ulama produktif yang banyak menuliskan kitab dalam berbagai bidang keilmuan yang juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, salah satunya dalam studi hadis. Menurutnya, dalam memahami sebuah teks (matan) hadis diperlukannya pemahaman tekstual dan kontekstual. Metode ini dipilih karena fokusnya pada pembentukan aturan dan tanggapan dari para orientalis. Hal ini mempermudah pemahaman hadis dengan merujuk pada kitab-kitab syarah (penjelasan)

⁴⁴ *Kerangka Teori: Pengertian, Contoh dan Cara Membuat* - Deepublish Store, https://deepublishstore.com/blog/kerangka-teori/?srsltid=AfmBOorIdb6vKFVfZak1UkiDlw_wcbA9FHPtqvE2lrG5LSE3VN9Avxw, accessed 4 Jun 2025.

⁴⁵ Ali Imron et al., *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2021).

yang ada sepanjang sejarah. Yūsuf al-Qardāwī juga tidak hanya menjelaskan hadis yang relevan dengan zaman sekarang secara detail, tetapi juga bagaimana menerapkannya.⁴⁶

Berdasarkan teori *ma’ānil ḥadīṣ* mengangkat pendekatan yang ditawarkan oleh salah satu tokoh pemikir hadis kontemporer Yūsuf al-Qardāwī, bahwa menurutnya teks saja tidak cukup untuk memahami hadis, tetapi mengetahui konteks hadis itu perlu. Konteks ini mencakup bagaimana kondisi yang ada pada saat itu termasuk politik dan sosial budaya. Selain bagaimana, pertanyaan dari mana hadis diturunkan juga penting untuk memahami suatu hadis.⁴⁷

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Yūsuf al-Qardāwī dalam kitabnya *Kaifa Nata’āmal Ma’ā Al-Sunnah Al-Nabawiyyah* membagi menjadi delapan kriteria dalam memahami sebuah teks (hadis), diantaranya sebagai berikut:

- a. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an
- b. Menghimpun hadis-hadis yang setema
- c. Tarjih (kompromi) antara hadis yang kontradiktif
- d. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuan (*Asbāb al-wurūd*)
- e. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap
- f. Membedakan antara ungkapan haqiqah dan majaz
- g. Membedakan antara yang ghaib dan nyata.
- h. Memastikan makna kata-kata dalam hadis.⁴⁸

Selanjutnya, dari delapan kriteria yang dipaparkan oleh Yūsuf al-Qardāwī, penulis tidak menggunakan seluruh kriteria dalam penelitian ini. hal tersebut dikarenakan tidak semua kriteria tersebut dapat diaplikasikan dalam meneliti suatu teks (hadis), melainkan menyesuaikan dengan konteks penelitian yang hendak dibahas serta tujuan dari penelitian. Adapun penelitian ini hanya menggunakan enam dari delapan teori Yūsuf al-Qardāwī, yakni 1) memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. 2) Menghimpun hadis-hadis yang setema. 3) Memahami sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuan. 4) Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap. 5) Memastikan makna kata-kata dalam hadis.

⁴⁶ Suryadi, “Pentingnya Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yūsuf Al-Qaraḍawī”, *Jurnal Living Hadis*, vol. 1, no. 1 (2016).

⁴⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’ānil Hadis Paradigma Interkoneksi: berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2016).

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, Terj, Muhammad al-baqir edition (Bandung: Kharisma, 1990).

Dalam hal ini, penulis mendasari ketertarikan menggunakan teori ini ialah bahwa teori yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qardāwī ini menekankan akan pentingnya memahami konteks dan makna di balik hadis dalam situasi yang dinamis. Teori *Ma’ānil Hadiṣ* mengajak kita untuk tidak hanya melihat teks hadis secara literal, melainkan juga untuk menggali makna dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks hadis kepemimpinan Quraisy, yang menyatakan bahwa ‘kepemimpinan itu berada pada Quraisy’, maka perlu memahami tidak hanya siapa yang berhak untuk memimpin, melainkan juga nilai-nilai dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang terkandung dalam hadis tersebut. Yūsuf al-Qardāwī menekankan bahwa setiap hadis harus dipahami dalam konteks social, budaya, dan politik yang relevan, sehingga interpretasi yang dihasilkan dapat lebih aplikatif dan kontekstual.

Teori pemahaman hadis Yūsuf al-Qardāwī ini dipilih karena pendekatannya yang komprehensif dan kontekstual. Al-Qardāwī menekankan bahwa pemahaman hadis tidak boleh berhenti pada teks semata, melainkan juga harus memperhatikan konteks historis dan tujuan utama hadis. Sehingga, dengan cara ini hadis dapat dipahami secara utuh, tidak kaku, dan lebih relevan dengan perkembangan zaman. Pemahaman yang hanya berfokus pada teks tanpa melihat konteks akan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pengamalan ajaran Islam. Selain itu, teori ini juga memberikan Solusi praktis dalam menjawab tantangan zaman modern, yakni pentingnya untuk mengontekstualisasikan hadis agar selaras dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Maka, prinsip ini dianggap sangat relevan sebagai panduan etis bagi umat Islam dalam menghadapi deras arus perpolitikan dan informasi yang belum benar.⁴⁹

Selain itu, teori pemahaman hadis yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qardāwī ini juga berhasil dalam menjembatani metodologi ulama klasik dengan kebutuhan umat Islam modern. Al-Qardhawi menegaskan bahwa dalam memahami hadis harus mempertahankan nilai-nilai universal Islam tanpa terjebak pada pendekatan yang kaku dan literal semata. Dengan demikian, ruang ijihad terbuka luas untuk menemukan Solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer dengan tetap berpegang teguh pada prinsip dasar ajaran Islam.⁵⁰

2. Teori Integrasi Interkoneksi

⁴⁹ Yūsuf al-Qardāwī, *Kayfa Nata’āmal ma’ā as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Virginia: al-Ma’had al-’Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1992), p. 147.

⁵⁰ *Ibid.*, pp. 167–95.

Integrasi berasal dari bahasa Inggris, “*Integrate*” yang berarti mengeintegrasikan, menyatukan, atau menggabungkan. “*Integration*” yang berasal dari kata kerja “to integrate”, berarti *to join to something else so as to form a whole* (bergabung kepada sesuatu yang lain sehingga membentuk keterpaduan) atau dengan *to join in society as a whole, spend time with members of other groups and develop habits like theirs*. Dapat juga diartikan sebagai *to bring (part) together in to a whole*, atau dengan arti *to remove barriers imposing segregation upon (racial group)*.⁵¹

Para intelektual Muslim memikirkan bagaimana mengintegrasikan atau mengislamkan ilmu pengetahuan. Ide ini muncul karena mereka merasa sangat sadar akan pentingnya agama di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Mereka percaya bahwa umat Islam bisa maju dan setara dengan Barat, asalkan mereka mampu menguasai ilmu pengetahuan secara nyata. Dengan begitu, mereka bisa lebih memahami ajaran agama (wahyu) dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Pendekatan integrasi interkoneksi lebih menghormati ilmu-ilmu umum yang ada, dikarenakan ilmu umum juga telah menetapkan landasan epistemologis, ontologis, hingga aksimiotik, serta mencari persamaan baik pendekatan maupun metode berpikir. Islam memang bukanlah sebuah agama yang lahir dan tumbuh dalam ruang hampa. Melainkan tempat yang kaya akan budaya. Oleh sebab itu, latar belakang historis dari praktik ide Islam selamanya akan diwarnai oleh berbagai upaya pembaharuan yang progresif secara konsisten.⁵²

Pada era modern Islam pasca kolonial, gagasan ilmu pengetahuan yang integratif bergaung kembali dalam berbagai konsep. Misalnya islamisasi ilmu pengetahuan, objektifikasi ajaran Islam, dan sebagainya. Para cendekiawan muslim kontemporer dalam kadar yang berbeda-beda mempunyai kemampuan untuk mendialogkan dan mempertautkan antara paradigma *Ulūm al-Dīn* (ilmu-ilmu agama Islam), *al-Fikr al-Islamī* (pemikiran Islam), dan *Dirāsāt Islāmiyyah* (studi keislaman) kontemporer. Yaitu, *Ulūm al-Dīn* (kalam, tafsir, fikih, ulum al-Qur'an, hadis, ataupun ilmu agama islam yang dipertumakan dan dialogkan dengan sungguh-sungguh, kemudian diintegrasikan dan interkoneksi dengan *Dirāsāt Islāmiyyah* dengan mempertimbangkan masukan dan

⁵¹ Syahrial Labaso, “Paradigma Integrasi-Interkoneksi di Tengah Kompleksitas Problem Kemanusiaan”, *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, vol. 15, no. 2 (2018), p. 335.

⁵² Imam Machali, “Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam”, *el-Tarbawi*, vol. 8, no. 1 (2015), pp. 32–53.

menggunakan acar berpikir dan metode sains modern, *social sciences*, dan *humanities* kontemporer sebagai pisau analisis dan cara berpikir keagamaannya.⁵³

Dalam pandangan Amin Abdullah, rasionalitas dan pemahaman agama membutuhkan interaksi yang konsisten untuk menjawab kebenaran dari berbagai perbaikan yang dibuktikan dengan tujuan dari agama dan berupaya untuk meningkatkan gagasan dalam membangun peradaban manusia. Sebagai jawaban atas segala fenomena tersebut, konsep integrasi interkoneksi datang sebagai tawaran untuk menjembatani tujuan yang diungkapkan diatas secara lebih luas.⁵⁴ Konsep seperti inilah nantinya akan memberikan penekanan bahwa adanya keterkaitan antara beberapa bidang ilmu pengetahuan yang sering luput dari kajian keislaman, padahal apabila diterapkan dengan baik, maka integrasi interkoneksi ilmu agama dengan ilmu pengetahuan (umum) akan membentuk kebermanfaatan dan membawa pemahaman yang lebih utuh.

Interpretasi nilai-nilai hadis politik merupakan sebuah upaya untuk memahami dan mengambil pelajaran dari hadis-hadis Nabi Saw., yang terkait dengan aspek kepemimpinan, pemerintahan, serta kehidupan masyarakat bernegara. Aspek-aspek tersebut meliputi, prinsip kepemimpinan, musyawarah, keadilan dan persamaan hak, penegakan hukum, serta kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.

Interpretasi nilai-nilai hadis politik melalui paradigma integrasi interkoneksi merupakan sebuah upaya yang digunakan untuk memahami dan mengimplementasikan hadis tentang politik dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keterpaduan dengan aspek kehidupan lainnya. integrasi interkoneksi tersebut berupa 1) integrasi antara agama dan politik yang melihat bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan. 2) Interkoneksi dengan aspek ekonomi, sosial, dan budaya hadis-hadis politik secara parsial, namun juga dilihat kaitannya dengan aspek kehidupan lainnya. 3) Menjembatani antara teks yang bersifat normatif dan realitas kehidupan politik yang dinamis dan kompleks. Dengan demikian, interpretasi nilai-nilai dalam hadis politik melalui paradigma integrasi interkoneksi nantinya memberikan panduan yang lebih kontekstual, holistik, dan relevan dalam menghadapi problematika politik dan kenegaraan di zaman modern.

⁵³ Yulanda, “Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkonektif M. Amin Abdullah dan Implementasinya dalam Keilmuan Islam”.

⁵⁴ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi: Sebuah Antologi* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2007).

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian (*research*) merupakan sebuah upaya untuk menemukan kebenaran atau lebih membenarkan kebenaran. Usaha mengejar kebenaran pun dilakukan melalui model-model tertentu. Metode juga merupakan sejumlah cara atau langkah yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian.⁵⁵

Metode penelitian merupakan salah satu bagian terpenting dan tidak dapat terlewatkan, dikarenakan hal tersebut adalah suatu bentuk kebutuhan penting dalam proses penyusunan penelitian, guna terwujudnya sebuah penelitian yang terstruktur dan sistematis, serta mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode ini merupakan fondasi utama dalam menyusun penelitian agar hasilnya terstruktur, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, agar penelitian berjalan dengan baik dan sesuai kaidah keilmuan, pemilihan dan penerapan metode penelitian yang tepat mutlak diperlukan.⁵⁶

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan melalui riset terhadap berbagai literatur (pustaka) yang berkaitan dengan tema penelitian. Di lain sisi, diartikan juga penelitian yang bersifat kepustakaan dengan data-data penelitian dari berbagai literatur, baik berupa kitab, buku, karya tulis, jurnal, ataupun artikel yang relevan dengan tema yang dikaji oleh dalam penelitian ini. Melalui data-data yang diperoleh tersebut, nantinya penulis akan membaca, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah penelitian sehingga penulis mengadopsi model penelitian kualitatif. Rifa'i Abubakar dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Metodologi Penelitian” menyebutkan beberapa karakteristik penelitian kualitatif. Adapun karakteristik tersebut antara lain adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada makna data dibalik yang dapat diamati.⁵⁷

Penelitian ini memfokuskan pada pendekatan pemikiran tokoh guna menganalisis secara mandalam dalam memahami hadis kepemimpinan politik Quraisy menggunakan *ma'ānil hadīṣ* Yūsuf al-Qardāwī dan Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah.

2. Sumber Data

⁵⁵ Ali Imron et al., *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*.

⁵⁶ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1 st edition (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

⁵⁷ *Ibid.*

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi didapatkan dari berbagai sumber yang relevan terkait topik penelitian yang dikaji. Melalui berbagai tahap atau upaya menelusuri, mengumpulkan, memilah, hingga mengadopsi ide atau gagasan dari berbagai literatur terkait problematika yang menjadi obyek penelitian tersebut. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh melalui sumber tertulis. Penelitian ini membagi sumber data menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini menggunakan rujukan utama yakni Adapun dari berbagai kitab hadis yang terhimpun dalam *al-kutub al-Tis'ah* yaitu *Šahīh Bukhārī*, *Šahīh Muslim*, *Sunan al-Tirmidzī*, *Sunan al-Nasā'ī*, *Sunan Abū Dāwud*, *Sunan ibn Mājah*, *Sunan al-Dārimī*, *Muwatṭhā' Imam Mālik*, dan *Musnad Ahmad ibn Hanbal* melalui bantuan software aplikasi hadis *jawāmi' al-kalīm*, *mausu'ah al-hadīs*, *maktabah syāmilah*, buku yang berjudul "Politik Kebangsaan: Studi Interpretasi Hadis-Hadis Politik", dan buku tentang paradigma integrasi interkoneksi Amin Abdullah.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada al-Qur'an, kitab *Kayfa Nata'āmal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah* karya Yūsuf al-Qardāwī untuk mengutip langkah-langkah dalam memahami hadis. Adapun data pendukung lainnya diperoleh dari beberapa karya tulis yang memiliki ketersinambungan dari objek penelitian, seperti artikel jurnal, skripsi, tesis, atau media lainnya. Selain itu, dat sekunder yang digunakan juga berupa kitab *syarah* hadis

Data sekunder yang digunakan untuk mencari kualitas dan keabsahan periwayat dalam menganalisis sanad menggunakan kitab *Taqrīb al-Tahzīb* dan *Tahzīb al-Tahzīb* karya ibn Hajjar al-Asqalānī. Kitab *Manhaj al-Naqd fī al-Matn* karya Ṣalāḥ al-Dīn ibn Aḥmad al-Adlābī untuk membantu dalam Analisa matan hadis. Beberapa kitab tafsir untuk membantu dalam menganalisa tafsir ayat al-Qur'an, seperti *Tafsīr Maṣātīḥ al-Ghayb* karya Faḥr al-Dīn al-Rāzī, *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* karya Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farh al-Anṣārī al-Khazrajī al-Qurtubī. Selain itu, juga menggunakan kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah* karya Imām Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabib al-Māwardī dalam membantu memahami hadis kepemimpinan politik Quraisy.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan objek kajian yang diteliti, pengumpulan data yang dilakukan mengarah pada kitab, buku, maupun artikel karya ilmiah berupa skripsi, tesis, maupun jurnal penelitian, baik berupa cetak maupun perangkat lunak (Pdf). Hal ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Setelah data-data tersebut terkumpul, akan dilakukan penelaahan objek primer berdasarkan rumusan masalah dan objek kajian yang menjadi acuan utama dalam penelitian. Setelah itu, melakukan tinjauan pustaka untuk menganalisis dari beberapa data yang terkumpul yang dalam pembahasannya terdapat persamaan maupun perbedaan dalam penelitian.

Dalam hal ini, dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini dapat menggali secara mendalam prinsip kepemimpinan dalam hadis dan relevansinya dengan tantangan modernisasi, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Pengumpulan data didasarkan pada dua sumber, yakni sumber primer dan sumber sekunder dengan dokumentasi yakni data dikumpulkan dari berbagai kerelevan kajian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini, misalnya diambil dari *al-Kutub al-Tis'ah* yang tidak lagi diragukan kredibilitasnya dengan menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak (software) hadis. Demikian pula dilakukan terhadap sumber-sumber sekunder.

Data tentang metodologi pemahaman hadis diambil dari kitab *Kayfa Nata'āmal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah* karya Yūsuf al-Qardāwī. Data mengenai pemahaman paradigma integrasi-interkoneksi diambil dari buku “*Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi: Sebuah Antologi*” yang ditulis oleh Amin Abdullah. Data ini ditunjang menggunakan beberapa artikel ilmiah dan penelitian lainnya yang merujuk pada sumber yang sama.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini juga menearapkan langkah-langkah analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori *ma'ānil hadīs* Yūsuf al-Qardāwī. Dalam mengelola data suatu hadis yang hendak diteliti, cara yang penulis lakukan yaitu dengan metode *takhrij al-hadīs*. *Takhrij al-hadīs* yaitu menelusuri hadis dari sumbernya yang berasal dari berbagai kitab *Shahīh, jami', sunan*, ataupun *musnad* yang dimana penelusuran tersebut lengkap dengan sanad dan matanya kemudian dilakukan penelitian kualitas hadisnya agar dapat diketahui bahwa hadisnya bisa menjadi hujjah atau tidak.⁵⁸ Metode *takhrij al-hadīs* yang penulis gunakan ialah *takhrij al-hadīs*

⁵⁸ Azan Sagala, “Takhrij dan Metode-Metodenya”, *Al-Ulum : Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 2 (2021), pp. 327–46.

bi al-lafadz yakni pencarian hadis lewat lafadz. Pada tahap *mentakhrīj* hadis, penulis memakai aplikasi *jawāmi’ al-kalīm* dan *maktabah syāmilah* guna memudahkan pencarian data. Dalam pencarian hadis tersebut penulis membatasi pada *kutub al-tis’ah*.

Selanjutnya ialah dengan *me-crosscheck* berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang merujuk pada kitab *Tafsīr Mafātīh al-Ghayb* karya Faqr al-Dīn al-Rāzī, *al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān* karya Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ al-Anṣārī al-Khaṣrajī al-Qurṭubī. Dalam pencarian makna hadis merujuk pada kitab syarah, seperti: *al-Minhāj Syarh Ṣahīh Muslim*, ‘Aun al-Ma’būd Syarh Sunan Abū Dawūd, *Tuhfah al-Āhwadzi Syarh Sunan al-Tirmidzi*, dan sebagainya. Kemudian dalam pencarian sumber sejarah merujuk pada buku Sirah Nabawiyyah dan buku Sejarah Agama Islam.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian kepustakaan yang dibuktikan dengan berbagai data atau sumber yang telah dituliskan diatas. Maka penulis ingin sampaikan bahwa dalam mengolah, menyusun, dan menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analisis merupakan salah satu bentuk metode penulisan dalam sebuah penelitian. Dengan kata lain, merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan, menganalisis, hingga mengidentifikasi suatu obyek penelitian melalui informasi atau data materi yang telah terhimpun. Selain itu, juga memiliki relevansi signifikan dengan problematika yang menjadi obyek penelitian sehingga memperoleh kesimpulan yang interpretatif dan komprehensif.⁵⁹

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya diolah pada proses menganalisis data. Dalam hal ini untuk mendapatkan pemahaman hadis, penulis akan menggunakan metode *ma’ānil ḥadīš*, sekaligus untuk mengetahui kerelevan hadis yang diteliti. Hal ini bertujuan agar hadis yang diteliti ini ketika dipakai tetap relevan seiring dengan kemajuan dan perubahan zaman.

Kemudian penulis akan melakukan proses analisis sebagai berikut, *pertama*, penulis menetapkan hadis-hadis yang akan diteliti, hal ini berupa hadis kepemimpinan Quraisy yang terdapat dalam *al-kutub al-tis’ah*. *Kedua*, penulis mengumpulkan hadis-hadis yang setema melalui *takhrīj* secara tematik, dalam proses ini penulis menggunakan bantuan software aplikasi hadis. *Ketiga*, penulis melakukan kajian kritik sanad dan matan guna mengetahui otentitas hadis yang diteliti. *Keempat*, penulis dalam menganalisis pemahaman hadis yang hendak diteliti menggunakan metode Yūsuf al-Qardāwī, dalam

⁵⁹ Abdurrahman, “Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam”, *Adabuna : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, vol. 3, no. 2 (2024), pp. 102–13.

hal ini penulis mengaplikasikan metode tersebut yakni: 1) Mengkroscek berdasarkan ayat suci al-Qur'an dengan tujuan memastikan bahwa hadis yang dikaji dan ayat al-Qur'an tidak bertentangan. Ketika didapati bertentangan biasanya hal tersebut karena hadisnya tidak *Sahīh* atau kurang tepat dalam memahaminya, 2) Meneliti hadis-hadis yang setema dari hadis yang hendak diteliti dengan mencari makna syarah hadisnya dalam kitab-kitab syarah, hal tersebut dilakukan agar menghasilkan ruang lingkup yang luas sehingga hadis dapat dipahami secara jelas. 3) Kemudian penulis memastikan *ghāyah* dan *wasilah* dalam hadis. Untuk memahami hadis secara benar dan mendalam diperlukannya mengetahui sebab yang melatarbelakangi kemunculannya, agar bisa diketahui kondisi dan keadaan pada saat hadis tersebut muncul, sehingga pesan yang disampaikan dari hadis dapat ditentukan dengan pasti. 4) Selanjutnya, memastikan sarana yang berubah dengan tujuan tetap dari hadis karena setiap zaman pasti akan ada perubahan, maka penulis melihat adanya perbedaan sarana dakwah yang dilakukan Nabi dengan dakwah di zaman sekarang. 5) Terakhir, memastikan makna dan konotasi kata dari hadis yang dikaji. Dalam hal ini mengenai hadis-hadis politik dan kepemimpinan Quraisy, kemudian mengontekstualisasikan dengan politik kontemporer saat ini. Dapat dilihat bahwa hadis yang dikaji masih relevan hanya saja sarana (*wasilah*) yang berbeda karena perkembangan zaman.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pemahaman hadis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis-normatif, sosio-historis, linguistik, dan interdisipliner. Pendekatan teologis-normatif yang dimaksudkan ialah menekankan pada pemahaman berdasarkan dasar-dasar agama, yakni al-Qur'an dan Hadis, serta norma-norma lain yang berasal dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Pendekatan sosio-historis ialah suatu bentuk pendekatan yang mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat, tempat, dan waktu hadis tersebut diriwayatkan. Pendekatan linguistik dipahami sebagai pemaknaan teks (hadis) Nabi dengan mempertimbangkan sebuah kata dan struktur gramatiskalnya. Sedangkan, pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara garis besar diklasifikasikan menjadi lima bab, yang masing-masing memiliki fokus berbeda. Dengan tujuan untuk memperjelas pembahasan dari

penelitian, agar pembahasannya tidak keluar dari koridor yang telah dirumuskan. Adapun sistematika pembahasannya yaitu:

Bab *pertama* merupakan bagian dari pendahuluan, meliputi latar belakang yang merupakan bagian keresahan penulis sehingga diangkatlah tema ini menjadi sebuah obyek kajian atau penelitian. Rumusan masalah yang menjadi batasan permasalahan yang akan dijawab oleh penulis dalam kajian ini. Tinjauan pustaka menjadi sebuah acuan untuk membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dikaji saat ini. Kerangka teori yang akan membantu dalam menjelaskan teori untuk menjawab pertanyaan. Metodologi penelitian merupakan bagian penjelasan terkait jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, hingga teknik pengolahan data. Sitematika pembahasan yang berisi penyajian atas pembahasan penulisan dalam penelitian skripsi ini.

Bab *kedua* merupakan bagian yang membahas terkait redaksional hadis politik yang menjadi fokus utama penelitian ini. Kemudian akan dilakukan *I'tibār sanad* terhadap hadis yang dijadikan rujukan utama demi mengetahui jalur periwayatan hadis tersebut. Kemudian, penulis akan menganalisis kualitas hadis dari segi sanad dan matan, sehingga dari hal inilah akan mengetahui apakah hadis yang dijadikan rujukan relevan untuk digunakan.

Bab *ketiga* menyajikan, menguraikan, dan membahas tentang pemahaman hadis tentang keutamaan dakwah dengan metode Yūsuf al-Qardāwī. Bab ini akan menjelaskan hadis tersebut berdasarkan metode *ma'ānil ḥadīṣ* Yūsuf al-Qardāwī, diantaranya ialah dengan memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an, dalam bagian ini peneliti akan menverifikasi hadis dengan ayat al-Qur'an yang berkaitan. Langkah selanjutnya, peneliti akan menghimpun hadis-hadis setema dari rujukan utama. Setelah itu, peneliti akan menjelaskan *Asbāb al-wurūd* hadis yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Kemudian peneliti akan menganalisi serta membedakan ghāyah dan wasilah yang ditinjau oleh peneliti.. Terakhir, peneliti akan menganalisis makna dalam hadis dan konotasi kata, dalam artian peneliti akan mengkontekstualisasi makna hadis tersebut dengan politik di zaman kontemporer.

Bab *keempat* merupakan inti dari kajian pada penelitian ini, yakni menguraikan relevansi dan interpretasi nilai-nilai hadis politik melalui paradigma integrasi interkoneksi. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk memahami dan mengimplementasikan hadis-hadis tentang politik dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keterpaduannya dengan berbagai aspek kehidupan.

Bab *kelima*, merupakan akhir dari kajian atau penutup dari penelitian ini yang mempunyai dua poin penting sebagai pembahasannya, yaitu: 1) kesimpulan yang berisikan jawaban atas segala problematika yang dikaji dalam penelitian ini. 2) saran yang berisikan

tentang rekomendasi dan solusi yang diberikan penulis terkait dengan penelitian dengan tema terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan metode *ma‘ānil hadīs* Yusuf Qardāwī terhadap hadis kepemimpinan Quraisy menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual. Pendekatan ini mengintegrasikan analisis teks hadis dengan prinsip-prinsip universal dalam Al-Quran, seperti ‘*adālah* (keadilan), *amānah* (amanah), dan *syūrā* (musyawarah). Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam tidak dibatasi oleh kesukuan, melainkan oleh kualifikasi moral dan kapabilitas. Hal ini sejalan dengan hadis-hadis lain yang menekankan pentingnya pemimpin yang adil, kompeten, dan bertanggung jawab, sehingga menegaskan bahwa esensi kepemimpinan Islam bersifat substantif, bukan formalistik.

Konteks sosio-politik Arab abad ketujuh menunjukkan bahwa Quraisy dipandang sebagai pemimpin dikarenakan pengaruh politik, ekonomi, dan jaringan diplomasi mereka, bukan semata-mata karena faktor genealogis. Yusuf Qardāwī menolak pemahaman literal yang menganggap kepemimpinan Quraisy sebagai ketentuan mutlak, melainkan melihatnya sebagai strategi Nabi untuk menjaga stabilitas dakwah. Pendekatan ini mengungkap bahwa hadis tersebut bersifat kondisional, bukan normatif-abadi. Dengan demikian, pemahaman yang tepat harus mempertimbangkan *maqāṣid syarī‘ah*, di mana kepemimpinan yang adil dan kompeten lebih utama daripada identitas kesukuan; nilai yang tetap relevan di segala zaman.

Pembedaan antara *gāyah* (tujuan) dan *wasīlah* (sarana) mengungkapkan bahwa tujuan fundamental adalah terciptanya kepemimpinan yang memiliki kompetensi dan kriteria yang mampu menegakkan agama dan keadilan, sedangkan penyebutan Quraisy merupakan konteks historis yang dapat berubah sesuai dengan dinamika sosial. Dalam konteks modern, sarana bisa berubah selama memenuhi prinsip dasar kepemimpinan Islam, seperti kapabilitas, amanah, dan keadilan. Contohnya, sistem demokrasi yang memilih pemimpin berdasarkan meritokrasi sejalan dengan *ghayah* hadis ini, meski tidak terikat pada kesukuan. Dengan demikian, Yūsuf al-Qardāwī menawarkan pemahaman transformatif yang mengutamakan substansi (keadilan dan kompetensi) dibanding formalitas (keturunan), sekaligus menjawab tantangan kekinian tanpa mengabaikan otentisitas teks.

Metode Qardāwī berkorelasi erat dengan paradigma integrasi-interkoneksi, yang menggabungkan analisis teks (*naqlī*) dengan pendekatan rasional (*‘aqlī*) dan interdisipliner. Paradigma ini memungkinkan hadis dipahami secara dinamis dengan menghubungkannya

dengan ilmu politik, sosiologi, dan sejarah. Misalnya, frasa “menegakkan agama” tidak hanya mencakup aspek ritual, tetapi juga pembangunan sistem politik yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini menjadikan pemahaman hadis relevan dengan tantangan kontemporer, seperti tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Paradigma ini mengungkap bahwa teks keagamaan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-historis dan disiplin ilmu lain. Implementasinya melibatkan analisis teks (*naqlī*) untuk meneliti otentisitas dan makna literal hadis, sementara pendekatan interdisipliner seperti sejarah, sosiologi politik, dan filsafat yang menjelaskan mengapa Quraisy dianggap pemimpin pada masa Nabi. Paradigma ini menegaskan bahwa hadis tersebut lebih bersifat strategis-kondisional daripada normatif-mutlak, mengingat Quraisy saat itu merupakan suku yang memiliki pengaruh politik, ekonomi, dan sosial yang dominan di Jazirah Arab. Dengan demikian, pemahaman hadis tidak boleh terjebak pada makna *harfiah*, melainkan harus dikaitkan dengan prinsip keadilan, kapabilitas, dan kemaslahatan umat.

Pemahaman transformatif dan pendekatan *burhānī* (nalar kritis) menjadi kunci dalam menafsirkan hadis ini secara kontekstual. Pemahaman transformatif menggeser fokus dari kesukuan ke prinsip universal seperti integritas dan kapabilitas, sementara pendekatan *burhānī* membedakan antara aspek temporal dan prinsip abadi. Korelasi antara teks dan realitas modern menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam tidak terbatas pada etnis tertentu, melainkan pada nilai-nilai keadilan dan musyawarah, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Hujurāt [49]:13.

Pemahaman kontekstual hadis ini memiliki implikasi luas dalam pendidikan, sosial, dan politik. Dalam pendidikan, ia mendorong pengajaran kepemimpinan berbasis meritokrasi. Dalam ranah sosial, ia menjadi dasar untuk menghindari diskriminasi etnis. Sementara di dunia politik, ia menekankan pentingnya pemimpin yang berintegritas dan visioner. Dengan demikian, hadis kepemimpinan Quraisy tidak lagi dipahami sebagai pembatasan kekuasaan, melainkan sebagai panduan menuju tata kelola yang adil dan berkelanjutan. Paradigma integrasi-interkoneksi memastikan nilai-nilai Islam tetap relevan sebagai solusi bagi problematika modern.

Secara komprehensif dari interpretasi hadis kepemimpinan Quraisy melalui metode Qardhawi dan paradigma integrasi-interkoneksi menunjukkan bahwa teks hadis ini berfungsi sebagai prinsip universal tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan. Hadis ini tidak boleh dipahami sebagai legitimasi kepemimpinan berdasarkan identitas primordial, melainkan sebagai panduan untuk membangun sistem kepemimpinan yang meritokratis, akuntabel, dan berorientasi pada

keadilan sosial. Paradigma integrasi-interkoneksi memungkinkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini untuk diaplikasikan secara kontekstual dalam berbagai dimensi kehidupan modern, mulai dari reformasi sistem politik yang demokratis hingga pengembangan budaya organisasi yang etis dan *sustainable*. Dengan demikian, hadis politik tidak hanya berfungsi sebagai rujukan normatif, tetapi juga sebagai inspirasi untuk inovasi sosial yang mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer. Implementasi hadis ini dalam kehidupan modern menunjukkan relevansi ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam yang mampu memberikan solusi holistik terhadap berbagai permasalahan kemanusiaan melalui pendekatan yang integratif dan interkonektif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan dalam skripsi ini, interpretasi nilai-nilai hadis politik atas kepemimpinan Quraisy (*ma'ānil hadīs Yūsuf al-Qardāwī*) melalui paradigma integrasi-interkoneksi, penting rasanya untuk menguasai setiap tahapan dan materi dalam memahaminya. Dalam upaya memahami suatu hadis secara mendala, agar tidak adanya kekeliruan, maka hadis harus dikaji secara kontekstual. Perlu adanya penguatan pemahaman metodologis dalam studi hadis, agar tidak terjebak dalam pemahaman tekstual yang sempit. Pendekatan kontekstual seperti yang ditawarkan oleh Yūsuf al-Qardāwī, di mana teori tersebut harus digunakan guna untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu fanatisne kelompok atau ketidakadilan sosial yang ditimbulkan atas kesalahpahaman teks.

Dalam upaya mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis politik di atas, sebaiknya prinsip *maqāṣid al-syārī'ah* dijadikan landasan dalam mengambil segala bentuk kebijakan. Esensi suatu kepemimpinan dalam Islam bukanlah terletak pada identitas tertentu, melainkan pada kemampuan yang mampu menegakkan keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Selain itu, pemahaman hadis yang telah diperoleh tersebut dieksplorasi melalui pendekatan integrasi-interkoneksi, sehingga nilai-nilai Islam dapat terus berdialog dengan perkembangan zaman.

Peneliti berharap, bahwa dengan adanya penelitian hadis tentang interpretasi nilai-nilai hadis politik dalam skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca dan politikus untuk tetap memahami dan mengaktualisasikan prinsip *maqāṣid al-syārī'ah* dalam perjalanan perpolitikan berbangsa dan bernegara. Peneliti menyadari, bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga diperlukannya saran, kritikan, dan masukan dari pembaca. Dengan demikian, pemahaman yang kontekstual terhadap hadis politik akan

berkontribusi bagi pembangunan peradaban Islam yang progresif, berkeadilan, dan tetap mengedepankan kemaslahatan umat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, “Tafsir Ayat-ayat Jihad dalam Perspektif Pendidikan dan Dakwah”, *Ad-Da’wah*, vol. 21, no. 1, 2023, pp. 01–11 [<https://doi.org/10.59109/addrawah.v21i1.34>].
- Abdul Haq Syawqi and Muhammad Khatibul Umam, “Nuansa Politik dalam Memahami Hadis: Analisa Metodologis-Historis”, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, vol. 7, no. 2, 2021, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah/article/view/9421/pdf>.
- Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma Interkoneksi: berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Abdurrahman, “Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam”, *Adabuna : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, vol. 3, no. 2, 2024, pp. 102–13 [<https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>].
- Abdurrahmān bin Kamāluddīn Abī Bakr bin Muḥammad bin Sabīquddīn bin Fakhruddīn bin ‘Uthmān bin Naṣīruddīn bin Muḥammad bin Saifuddīn Khūḍarī al-Khūḍairī, al-Imām Jalāluddīn as-Suyūṭī, al-Miṣrī, *Tārīkh al-Khulafā’*, 1st edition, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2011.
- Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi‘ al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh ﷺ wa Sunanīhi wa Ayyāmīhi*, Bayrūt: Dār Thuq Nājah, 1442H.
- Abū ‘Abdirrahmān Aḥmad bin Syu‘aib bin ‘Alī bin Sinān bin Baḥr al-Khurāsānī an-Nasā’ī, *as-Sunan al-Kubrā*, Bayrūt: Mu’assasah al-Risālah, 1421.
- Abū al-‘Abbās al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Muṣhim Limā Ushkila min Talkhīṣi Kitābi Muslim*, vol. 12, Bayrūt: Dār Ibn Kathīr Dimasyq, 1417.
- Abū al-‘Abbās Taqī ad-Dīn Ahmad bin ‘Abd al-Halīm bin ‘Abd as-Salām bin ‘Abdillāh bin Taimiyyah al-Ḥarrānī, *As-Siyāsah asy-Syar’iyyah fī Islāhi ar-Rā’ī wa ar-Ra’iyyah*, Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm, 1440.
- Abū al-Ḥasan al-Ash‘arī, *Maqālāt al-Islāmiyyīn I*.
- Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Umar asy-Syaikhī al-Khāzin, *Lubāb at-Ta’wīl fī Ma’ānī at-Tanzīl*, Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415.
- Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn ‘Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Kairo: Dār Ḥiṣr, 1419.
- Abū Muḥammad ’Abdullāh ibn ’Abd ar-Raḥmān ibn al-Faḍl ibn Bahrām ibn ’Abd aṣ-Šamad at-Tamīmī ad-Dārimī as-Samarqandī, *Sunan ad-Dārimī al-Ḥadīth al-Marfū’ wa al-Mawqūf wa al-Maqṭū’*, vol. 3, Riyadh: Dār al-Mughnī li an-Nashr wa at-Tawzī’ al-Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Sa’ūdiyyah, 1412.
- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān*, Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyya, 1384.
- Adib, M. Afiqul, “Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah”, *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 7, no. 2, 2022, p. 87 [<https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i2.11665>].
- Afsaruddin, Asma, “Excellence and Precedence: Medieval Islamic Discourse on Legitimate Leadership”, *The American Journal of Islamic Social Sciences*, vol. 21:2, 2002.

Afsya Septa Nugraha and Srifariyati, "Prinsip Kepemimpinan dalam Perpektif QS. An-Nisa: 58-59", *Jurnal Madaniyah*, vol. 9, no. 1, 2019, <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/79/61>.

Ahmad bin 'Abd al-Halīm bin 'Abd as-Salām Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Shar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Ra'iyyah*, Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.

Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad bin Idrīs al-Sayybānī, *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Bayrūt: Mu'assasah al-Risālah, 1421.

Akmal, Muhammad Ichsanul, "Pemikiran Amin Abdullah Seputar Integrasi Keilmuan", *Fathir: Jurnal Studi Islam*, vol. 1, no. 2, 2024, pp. 120–36 [<https://doi.org/10.71153/fathir.v1i2.13>].

Alfatimah99, "Memahami Nilai-Nilai Integratif Islam dan Pancasila", *IAI Al-Fatimah Bojonegoro*, 26 Oct 2023, <https://iai-alfatimah.ac.id/memahami-nilai-nilai-integratif-islam-dan-pancasila/>, accessed 14 Jun 2025.

Alfi Sahroh, "Peran Saad bin Abi Waqqash dalam Perang Qadisiyyah dan Pengaruhnya di Irak Tahun 14-15 H/637-638 M", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21157/1/12120056_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, accessed 13 Jun 2025.

al-Ḥusayn ibn Maḥmūd ibn al-Ḥasan Mār al-Dīn al-Zaydānī al-Kūfī, *al-Mafātīḥ fī Sharḥ al-Maṣābīh*, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2012.

Ali Imron et al., *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2021.

Ali Mohtarom, "Kiat Memilih Seorang Pemimpin dalam Konteks Hadis", *Jurnal Mu'allim*, vol. 6, no. 1, 2024, pp. 32–46 [<https://doi.org/10.35891/muallim.v6i1.4507>].

Al-Imām Abūl Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī an-Naysābūrī, *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Bayrūt: Dār Ihyā' at-Turāth al-'Arabī, 1374.

Amin Abdullah, *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkoneksi dalam Kajian Pendidikan Islam*, ed. by H. Maragustam, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Aminuddin, Luthfi Hadi, *Integrasi Ilmu dan Agama: Studi atas Paradigma Integratif- Interkoneksi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, vol. 4, 2010.

Amri, Khairul, "Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam", *Jurnal Mumtaz*, vol. 2, no. 1, 2022.

Anam, Mohammad Choirul, Dul Saiin, and Muhammad Arifin, "The History of False Hadiths Sejarah Periwayatan Hadist Palsu", *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, vol. 10, no. 1, 2022, <https://ejurnal.staimaarf.ac.id/index.php/alfatih/article/download/49-57/42/209>.

Anisatun Muthi'ah, "Pemimpin Ideal dalam Perspektif Hadis", *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, vol. 5, no. 1, 2019, pp. 75–92.

Annissa, Jeanie and Ricky Widyananda Putra, "Radikalisme Agama Dan Tantangan Identitas Nasional Di Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1, 2022, pp. 1211–8 [<https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2698>].

Ardiyanti, "Konsep Keadilan Politik dalam Menegakkan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, vol. 7, no. 2, 2022, pp. 217–35 [<https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i2.2542>].

- Azan Sagala, "Takhrij dan Metode-Metodenya", *Al-Ulum : Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 2, 2021, pp. 327–46.
- Azis, Taufik Burhanudin, "Konsep Keteladanan dalam Surat al-Ahzab Ayat 21 sebagai Metode Pendidikan Islam", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 10, no. 1, 2024.
- Baderan, Suprisno and IAIN Sultan Amai Gorontalo, *Pemikiran Politik Yūsuf al-Qardāwī*, vol. 21, no. 1, 2024.
- Bin Salman, Abdul Matin, "Hadis Nabi Dalam Politik Kekuasaan: Studi Pemaknaan Hadis Nabi Perspektif Kekuasaan", *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, vol. 6, no. 2, 2022, p. 471 [<https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4236>].
- , "Hadis Nabi Dalam Politik Kekuasaan: Studi Pemaknaan Hadis Nabi Perspektif Kekuasaan", *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, vol. 6, no. 2, 2022, p. 471 [<https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4236>].
- Brata, Yat Rospia and Rina Dwi Gustina, "Peranan Abu Ubaiah bin Jarrah dalam Perang Yarmuk Tahun 636 M", *Jurnal Artefak*, vol. 2, no. 1, 2017 [<https://doi.org/10.25157/ja.v2i1.303>].
- Bustami Saladin, "Prinsip Musyawarah dalam al-Qur'an", *Jurnal el-Umdah*, vol. 1, no. 2, 2018.
- Darda, Abu, *Integrasi Ilmu dan Agama: Perkembangan Konseptual di Indonesia*, vol. 10, no. 1, 2015.
- Dianto, Icol, *Kepemimpinan Komunitas (Kepemimpinan Komunitas Muslim Menurut Hadis Rasulullah Saw)*, vol. 2, 2019.
- Dr. Aan Supian, M.Ag., *Etika Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif hadis*, Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.
- Dr. Edi Susanto, M.Fil.I., *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, 1st edition, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, <https://repository.iainmadura.ac.id/19/1/Dimensi%20Studi%20Islam%20Kontemporer.pdf>.
- Dr. Lukman Arake, Lc. MA., *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan*, 1st edition, Yogyakarta: CV. Lintas Nalar, 2020.
- Dr. Musyarif, M.Ag, *Sejarah Peradaban Islam (Pra Islam sampai Bani Umayyah)*, 1st edition, Parepare, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Efendi, Indra and Charles Charles, "Politik Identitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, vol. 1, no. 2, 2022, pp. 431–40 [<https://doi.org/10.31004/jpion.v1i2.71>].
- Erni Setyowati, Eri Kusumawati, and Yusi Susanti, "Implikasi Pendidikan dalam Perpspektif al-Qur'an: Telaah Terhadap Surat al-Isra Ayat 36, an-Nur Ayat 24, dan Yasin ayat 65 Terhadap Menuntut Ilmu", *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, vol. 5, no. 1, 2025, pp. 92–102.
- Fahr al-Dīn al-Rāzī, *Tafsīr Mafātīḥ al-Ghayb*, Bayrūt: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1420.
- Faisal, Faisal, Zulfadli Zulfadli, and Fajrul Ramadan Puarada, "Resolusi Konflik Perebutan Mayat: Negosiasi Antaragama di Sentani, Papua", *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, vol. 5, no. 2, 2024, pp. 158–78 [<https://doi.org/10.53491/porosonim.v5i2.1317>].
- Fauziah, Arinal Haq and Diah Ayu Nurulita, *Integrasi Nilai Pendidikan dalam Surah al-Isra' Ayat 36 untuk Mencegah Perilaku Impulsivitas di Media Sosial*, vol. 2, 2024.

Fika Ratna Pratiwi, "Konsep Kepemimpinan Islam: Studi Komparatif Al-Qur'an dan Hadis", *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 2, 2025, pp. 294–306 [https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.615].

Fitria Zelfis, Defel Fakhyadi, "Hermeneutika Kritis Khaled M. Abou El Fadl dalam Rekonstruksi Hukum Islam (Studi Analisis Fikih Otoriter menjadi Otoritatif)", *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 1–8 [https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.478].

Hamdani, Muslem, "Pola Dakwah Pada Masa Khulafaur Rasyidin", *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah dalam Mata Tinta*, vol. 6, no. 1, 2019, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1738/1/Muhammad%20Arif.pdf.

Hari Putra Z, "Memahami Hadis Kepemimpinan Quraisy", Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Hasyimah Nasution, *Filsafat Islam*, Jakarta: Gaya Media Prataa, 1999.

Home Sweet Home, *Aplikasi Hadis Soft*, 1440.

Ibn al-Mulqīn Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ ‘Umar bin ‘Alī bin Aḥmad al-Shāfi‘ī al-Miṣrī, *al-Tawdīḥ li Syarḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Dimasyq: Dār al-Nawādir, 2008.

Imād al-Dīn Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kathīr bin Ḏaw’ bin Kathīr al-Qurashī al-Dimashqī al-Shāfi‘ī, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Bayrūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1408.

Imām Abū al-Hasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wal Wilāyat al-Dīniyyah*, Kairo: Dār al-Ḥadīth.

Imām Ibn Hazm, *al-Fiqal fī al-Milal wa al-Nihāl*, Bayrūt: Dār al-Ma‘rifah, 1404.

Jafar, Wahyu Abdul, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadis", *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, vol. 3, no. 1, 2018, p. 18 [https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140].

Jamal, Irwansyah Muhammad and Riza Afrian Mustaqim, "Criteria for Legal Competence in Islamic Law: A Critical Evaluation", *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 25, no. 2, 2023, p. 235 [https://doi.org/10.22373/jms.v25i1.11183].

Jannah, Raodatul, "Hadis tentang Politik", *Jurnal Riset Agama*, vol. 1, no. 1, 2021, pp. 119–32 [https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14343].

Khasanah, Lathifatul, "Surat al-Ahzab Ayat 21 sebagai Metode Keteldanan Pendidikan", *JIEBAR : Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research*, vol. 4, no. 1, 2023, pp. 52–67 [https://doi.org/10.33853/jiebar.v4i1.606].

Labaso, Syahrial, "Paradigma Integrasi-Interkoneksi di Tengah Kompleksitas Problem Kemanusiaan", *Al-A'rāf : Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, vol. 15, no. 2, 2018, p. 335 [https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i2.1462].

Lukman, Fadhli, "Integrasi-Interkoneksi dalam Studi Hadis Disertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", *RELIGIA*, vol. 19, no. 2, 2017, p. 1 [https://doi.org/10.28918/religia.v19i2.746].

M. Amin Abdullah, *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi: Sebuah Antologi*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2007.

M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Machali, Imam, “Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam”, *el-Tarbawi*, vol. 8, no. 1, 2015, pp. 32–53 [<https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art3>].

Mahmūd al-Ṭāḥḥān, *Uṣūl al-Takhrij wa Dirāsāt al-Asānīd*.

Mahyarni and Alpizar, “Implikasi Integrasi Sains dan Agama Terhadap Pendidikan Islam”, *Journal of Islamic Education El Madani*, vol. 3, no. 2, 2024, <https://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JIEE/article/view/89/92>.

Massi, Randy Atma R., *Syura dan Legitimasi Umat dalam Suksesi Kepemimpinan Khulafa’ur Rasyidin*, vol. 1, no. 2, 2020.

Masyitoh, Dewi, “Amin Abdullah dan Paradigma Integrasi-Interkoneksi”, *JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora)*, vol. 4, no. 1, 2020, p. 81 [<https://doi.org/10.30595/jssh.v4i1.5973>].

Melyani, Mila, “Pemahaman Hadis Kepemimpinan Quraisy: Studi Komparatif Tipologi Kepemimpinan Quraisy Dengan Tipologi Kepemimpinan Di Indonesia”, *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 175–82 [<https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.6449>].

Mismubarak, “Integrasi Agama dan Politik (Tela’ah Pemikiran Hamka terhadap Ayat-Ayat Politik dalam tafsir al-Azhar)”, Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2019.

Moh. Misbakhul Koir, “Kultur Arab dalam Hadits Pemimpin Negara dari Suku Quraysh”, *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits*, vols. 4, Nomor 2, 2 Desember, mutawatir.uinsby.ac.id/index.php/Mutawatir/ article/download/60/58.

Muawiyah bin Abu Sufyan - wikishia, https://id.wikishia.net/view/Muawiyah_bin_Abu_Sufyan, accessed 4 Jun 2025.

Muhammad Fathul Khoiry and Ali Ramadhan Rafsanjani, “Sunnah Nabi dan metode memahaminya menurut Yūsuf al-Qardāwī”, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, vol. 3, no. 1, 2023.

Muhammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kathīr ibn Ghālib al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, Bayrūt: Mu’assasah al-Risālah, 1420.

Munawwar Khalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

Mustofa, Imam, “Memahami Hadits Kepemimpinan Dari Bangsa Quraisy dan Relevansinya Dengan Konsep Kepemimpinan Kontemporer”, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’ān dan al-Hadits*, vol. 14, no. 2, 2020, pp. 271–92 [<https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.6578>].

Muttaqin, Ja’far and Aang Apriadi, “Syura atau Musyawarah dalam Perspektif al-Qur’ān”, *al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan*, vol. 1, no. 2, 2020, pp. 57–73 [<https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18>].

Nashir, Haedar, “Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer”, *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, vol. 1, no. 1, 2017 [<https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1209>].

Nasution, Gusniarti et al., “Situasi Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam”, *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial*, vol. 1, no. 1, 2022, p. 85 [<https://doi.org/10.24014/tsaqifa.v1i1.16541>].

Novita Pancanungrum, “Kontekstual Konsep Kepemimpinan dalam Teks Hadis”, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, vol. 4, no. 2, 2018.

Nur, Muhammad, *Integrasi-Interkoneksi Agama dan Politik*, vol. 5, no. 1, 2015.

- Pramitha, Devi, "Kajian Tematis al-Qur'an dan Hadis tentang Kepemimpinan", *J-PAI*, vol. 3, no. 1, 2017 [https://doi.org/10.18860/j-pai.v3i1.3989].
- Qorina, Ulfa and M. Hajir Nonci, *Paradigma dan Konsep Integrasi Ilmu*.
- Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam", *Jurnal Peradaban Islam*, vol. 13, no. 3, 2017, https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/viewFile/981/777.
- Rif'ah and Ummi Habibatul Islamiyah, "Pendidikan Islam Menjawab Tantangan Globalisasi", *Islam Universalia : International Journal Of Islamic Studies And Social Sciences*, vol. 4, no. 1, 2022, https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v4i1.211.
- Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1 st edition, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Rizkia, Tiara Putri and Muhammad Ricky Hardiyansyah, "Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab", *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 2, no. 2, 2023, pp. 88–94 [https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.811].
- Rizqi Shohibul Khotami and M. Reza Saputra, "Pemahaman Hadis Al-Ghazali tentang Menasihati Pemimpin: Studi Kasus Pejabat Negara di Indonesia", *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, vol. 5, no. 3, 2024, pp. 202–16 [https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i3.1497].
- Rohmah, Tazkiyyatur, "Strategi Peperangan Khalid bin Walid dalam Perang Mu'tah dan Perang Yarmuk", *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, vol. 1, no. 01, 2022, pp. 95–109 [https://doi.org/10.24090/jsij.v1i1.6642].
- Ruslan, Idrus and Kiki Muhammad Hakiki, "Politik Identitas dan Tantangan Hubungan antar Agama di Indonesia", *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, vol. 17, no 2, 2022, https://doi.org/10.24042/al-adyan.v17i2.14755.
- Sadzali, Ahmad, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi", *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 2, 2020, pp. 341–75 [https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375].
- Said Agil Husin Al-Munawar and Masykur Hakin, *Dasar-Dasar Ilmu Takhrij dan Studi Sanad*, Semarang: Toga Putra Group, 1995.
- Şalāh al-Dīn bin Aḥmad al-Adlabī, *Manhaj al-Naqd fī al-Matn*, Bayrūt: Dār Jadīdah, 1983.
- Samsu, La, "As-Sultāh at-Tashrī'iyah, As-Sultāh at-Tanfīzīyyah, As-Sultāh al-Qaḍā'iyah", *Tahkim*, vol. XIII, no. 1, 2017, pp. 155–71.
- Selviana, Selviana, Syamzan Syukur, and Rahmawati Rahmawati, "Latar Belakang Terjadinya Perang Jamal dan Perang Shiffin pada Masa Ali Bin Abi Thalib", *Global Islamika: Jurnal Studi dan Pemikiran Islam*, vol. 3, no. 1, Global Islamika: Jurnal Studi dan Pemikiran Islam, 2024 [https://doi.org/10.5281/ZENODO.12597874].
- Sely Agustina, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia", *Cakrawala Pascasarjana IAINU Kebumen*, vol. 6, no. 1, 2022, pp. 71–83.
- Setiadi, Ozi, *Kepemimpinan Bani Quraisy*, vol. 4, 2018.
- Setyawan, Miftah Arif et al., "Urgensi Etika Islam dalam Politik Kontemporer", *Aksioreligia*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 56–64 [https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v2i2.554].

Sharaf al-Dīn al-Ḥusayn ibn ‘Abd Allāh al-Ṭibī, *al-Kashshāf ‘an ḥaqā’iq al-Sunan*, Riyāḍ: Maktabat Muṣṭafā al-Bāz, 1997.

Shihābud-Dīn Abul-Faḍl Aḥmad ibn Nūrud-Dīn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥajar al-‘Asqalānī al-Kināni, *Taqrīb al-Tahdhīb*, Syuria: Dār al-Rashīd, 1406.

----, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Bayrūt: Mu’assasah al-Risālah, 1435.

Siregar, Parluhutan, “Integrasi Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Perspektif M. Amin Abdullah”, *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, vol. 38, no. 2, 2014 [<https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.66>].

Surur, Agus Miftakus, Siti Mahmudah, and Siti Nur, “Integrasi Ilmu Agama dengan Ilmu Umum untuk Menghadapi Era Globalisasi”, *P*, vol. 3, no. 1, 2018.

Suryadi, “Pentingnya Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yūsuf Al-Qaradawī”, *Jurnal Living Hadis*, vol. 1, no. 1, 2016.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih, “Pemahaman Hadis tentang Covid-19 dalam Perspektif Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah”, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 18, no. 2, 2020, p. 173 [<https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3795>].

Sutisna, Sutisna, Evan Edo Prasetya, and Yono Yono, “Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Imam al-Mawardi (Kajian Literatur Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah)”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 19, no. 1, 2021, pp. 43–56 [<https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.1984>].

Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Tamimi, Moh., “Implementasi Hadis Dalam Hukum Sosial dan Politik”, *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 105–23 [<https://doi.org/10.20414/sophist.v2i1.24>].

Tangngareng, Tasmin, Zulfahmi Zulfahmi, and Fathul Mujahidin Al-Anshary, “Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi Saw.”, *Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah*, vol. 1, no. 1, 2021, pp. 45–63 [<https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v1i1.24586>].

Tumpal Daniel S, “Pilpres 2024: Pupulisme Islam dan Politik Identitas”, *Alasma | Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, vol. 3, no. 2, 2023.

Veni Sofia and Syaiful Dinata, “Integrasi Agama dan Sains: Dari Tokoh Pembaharuan M. Amin Abdullah”, *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 41–50.

Wahyu Saepudin, “Konsep dan Kontekstualisasi Kepemimpinan dalam Hadis”, *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, vol. 8, no. 1, 2021, pp. 64–76 [<https://doi.org/10.32505/politica.v8i1.3074>].

Wahyudi, Mohamad Nur and Moh Hasan Su’aidi, “Konsep Integrasi-Interkoneksi M. Amin Abdullah (Implikasinya Bagi Pengembangan Studi Islam)”, *IQTIRAN E-ISSN: Journal of Quranic and Interpretation Studies*, vol. 1, no. 1, 2025, <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/iqtiran/article/download/2073/669/3477>.

Walī al-Dīn ‘Abd al-Rahmān ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abī Bakr Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.

Wildan Fatoni Yusuf and Hilmi Husaini Zuhri, “Telaah Hadis Kepemimpinan Quraisy Melalui Pendekatan Sosio-Historis”, *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies*, vol. 1, no. 2, 2023, pp. 197–213 [<https://doi.org/10.61994/alshamela.v1i2.182>].

Yenti, Elvi, Ilyas Husti, and Nurhadi Nurhadi, “Perkembangan Model Integrasi Pendidikan dalam Hadist dan Penerapan”, *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies*, vol. 2, no. 2, 2022, p. 48 [<https://doi.org/10.24014/at-tajdid.v2i2.15984>].

Yulanda, Atika-, “Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkoneksi M. Amin Abdullah dan Implementasinya dalam Keilmuan Islam”, *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol. 18, no. 1, 2020, pp. 79–104 [<https://doi.org/10.30631/tjd.v18i1.87>].

Yunus, Firdaus M., Azwurfajri Azwurfajri, and Muhammad Yusuf, “Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh”, *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, vol. 17, no. 1, 2023, pp. 181–92 [<https://doi.org/10.24815/jsu.v17i1.32865>].

Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Daulah Fī al-Islām*, Cet. 1 edition, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.

Yūsuf al-Qardāwī, *Kayfa Nata 'āmal ma 'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, Virginia: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1992.

Yūsuf al-Qardāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, by Muhammad al-Baqir edition, Bandung: Karisma, 1993.

Yūsuf al-Qardāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, Terj, Muhammad al-baqir edition, Bandung: Kharisma, 1990.

Zumaro, Ahmad, “Bantahan Sunni terhadap Syiah tentang Ketidak Keadilan (‘Adalah) Sahabat”, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, vol. 17, no. 1, 2023, pp. 85–102 [<https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v17i1.16013>].

Zumrodi, Zumrodi, “Respon Hadis Terhadap Budaya Masyarakat Arab”, *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, vol. 3, no. 1, 2018, p. 121 [<https://doi.org/10.21043/riwayah.v3i1.3441>].

Sumber Web:

1 Januari 630 Masehi Sejarah Hari Peristiwa “Fathu Makkah”, <https://jateng.nu.or.id/fragmen/1-januari-630-masehi-sejarah-hari-peristiwa-fathu-makkah-CxEPB>, accessed 18 Jun 2025.

7 Ayat Al-Qur'an tentang Pemimpin dan Kepemimpinan, <https://islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/7-ayat-al-qur-an-tentang-pemimpin-dan-kepemimpinan-Yu8Yt>, accessed 18 Jun 2025.

“Belajar Perdamaian dari Perjanjian Hudaibiyah”, *Alif.ID*, 13 May 2020, <https://alif.id/read/amalia-dwi-fitriani/belajar-perdamaian-dari-perjanjian-hudaibiyah-b229205p/>, accessed 18 Jun 2025.

Fakhruddin, Muhammad Anas, “Surat As-Syura Ayat 38, Dalil Demokrasi dalam Al Quran”, *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia*, 18 Sep 2020, <https://tafsiralquran.id/surat-as-syura-ayat-38-dalil-demokrasi-dalam-al-quran/>, accessed 18 Jun 2025

Hadits - Hadits Tazkia, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/7:955>, accessed 29 May 2025.

----, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:834>, accessed 18 Jun 2025.

----, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:835>, accessed 18 Jun 2025.

----, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:1947>, accessed 8 Jun 2025.

Hadits Bukhari No. 57 | Siapa yang bertanya tentang ilmu sedang dia terus menyampaikan pertanyaannya...., <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/57>, accessed 18 Jun 2025.

- “Hadits Bukhari No. 3239 | Sikap terpuji kaum Quraisy”, *Hadits.id*, <http://www.hadits.id/hadits/bukhari/3239>, accessed 18 Jun 2025.
- “Hadits Muslim No. 3447 | Sebaik-baik dan seburuk-butuk umat”, *Hadits.id*, <http://www.hadits.id/hadits/muslim/3447>, accessed 15 Jun 2025.
- Hafidh, Al, “Semiotika Hadis Kepemimpinan Quraisy (I)”, *gontornews.com*, 26 Mar 2019, <https://gontornews.com/semiotika-hadis-kepemimpinan-quraisy-i/>, accessed 10 Jun 2025.
- Ilham, “Al Baqarah ayat 124 Jelaskan Nabi Ibrahim sebagai Imam Umat Manusia”, *Muhammadiyah*, 28 Jan 2021, <https://muhammadiyah.or.id/2021/01/al-baqarah-ayat-124-jelaskan-nabi-ibrahim-sebagai-imam-umat-manusia/>, accessed 18 Jun 2025.
- Kampung Tsaqifah Bani Saidah, Saksi Suksesi Awal Kepemimpinan dalam Islam*, <https://jatim.nu.or.id/rehat/kampung-tsaqifah-bani-saidah-saksi-suksesi-awal-kepemimpinan-dalam-islam-TxRaw>, accessed 18 Jun 2025.
- Kerangka Teori: Pengertian, Contoh dan Cara Membuat* - Deepublish Store, https://deepublishstore.com/blog/kerangka-teori/?srsltid=AfmBOOrIdb6vKFVfZak1UkiDlw_wcbA9FHPltpvE2lrG5LSE3VN9Avxw, accessed 4 Jun 2025.
- Keutamaan Mu'awiyah bin Abi Sufyan Radhiyallahu Anhu | Almanhaj*, 23 Nov 2013, <https://almanhaj.or.id/3768-keutamaan-muawiyah-bin-abi-sufyan-radhiyallahu-anhu.html>, accessed 4 Jun 2025.
- Kisah Thalhah bin Ubaidillah, Sahabat Pemberani yang Dijamin Masuk Surga*, <https://alazharpeduli.or.id/publikasi/artikel-berita/p/kisah-thalhah-bin-ubaidillah-sahabat-pemberani-yang-dijamin-masuk-surga>, accessed 18 Jun 2025.
- Kompas, Andreas Yoga Prasetyo/Litbang, “Survei ‘Kompas’: Mayoritas Publik Apresiasi Kinerja Politik-Keamanan Pemerintah”, *kompas.id*, 19 Feb 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/02/19/survei-kompas-majoritas-publik-apresiasi-kinerja-politik-keamanan-pemerintah>, accessed 3 Jun 2025.
- “Lima Butir Perjanjian Hudaibiyah”, *NU Online*, <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/lima-butir-perjanjian-hudaibiyah-Xxc3X>, accessed 18 Jun 2025.
- Menuju Politik yang Berkeadaban dalam Islam*, <https://www.nu.or.id/pustaka/menuju-politik-yang-berkeadaban-dalam-islam-DpkgI>, accessed 3 Jun 2025.
- “Metode Penelitian Kepustakaan - Penerbit Litnus -”, *Penerbit Litnus*, <https://penerbitlitnus.co.id/product/metode-penelitian-kepustakaan/>, accessed 4 Jun 2025
- Politik Kebangsaan: Studi Interpretasi Hadis-Hadis Politik*, <https://nu.or.id/pustaka/politik-kebangsaan-studi-interpretasi-hadis-hadis-politik-ShWSk>, accessed 3 Jun 2025
- “Sahabat Nabi yang Berkuda di Atas Lautan”, *Jernih.co*, <https://jernih.co/potpourri/sahabat-nabi-yang-berkuda-di-atas-lautan/>, accessed 18 Jun 2025.
- “Siapa Imam atau Pemimpin yang Adil dalam Hadits Nabi?”, *NU Online*, <https://nu.or.id/ilmu-hadits/siapa-imam-atau-pemimpin-yang-adil-dalam-hadits-nabi-PkHlo>, accessed 10 Jun 2025
- Surat Al-Ahzab Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online*, <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/21>, accessed 8 Jun 2025.
- Surat Al-Baqarah Ayat 124: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online*, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/124>, accessed 14 Jun 2025.

- Surat Al-Baqarah Ayat 247: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online*, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/247>, accessed 18 Jun 2025.
- Surat Al-Hajj Ayat 41: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online*, <https://quran.nu.or.id/al-hajj/41>, accessed 5 Jun 2025.
- Surat Al-Isra' Ayat 36: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online*, <https://quran.nu.or.id/al-isra/36>, accessed 5 Jun 2025.
- Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online*, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>, accessed 5 Jun 2025.
- Surat An-Nisa' Ayat 59: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online*, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59>, accessed 4 Jun 2025.
- Surat Asy-Syura Ayat 38: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online*, <https://quran.nu.or.id/asy-syura/38>, accessed 2 Jun 2025.
- Surat Quraisy: Arab, Latin dan Terjemah Lengkap | Quran NU Online*, <https://quran.nu.or.id/quraisy>, accessed 30 May 2025
- Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 124: Ragam Ujian pada Nabi Ibrahim*, <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-124-ragam-ujian-pada-nabi-ibrahim-8vvnV>, accessed 18 Jun 2025.
- “Tafsir Surat Al-Quraisy Ayat 1-2: Rahasia Kesuksesan Dagang Suku Quraisy”, *NU Online*, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-quraisy-ayat-1-2-rahasia-kesuksesan-dagang-suku-quraisy-FUWLy>, accessed 31 May 2025.
- “Tafsir Surat Al-Quraisy Ayat 3-4: Keamanan dan Ekonomi adalah Kunci Kesejahteraan Hidup”, *NU Online*, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-quraisy-ayat-3-4-keamanan-dan-ekonomi-adalah-kunci-kesejahteraan-hidup-slX6K>, accessed 30 May 2025.
- “The Ulama in Contemporary Islam”, *Wikipedia*, 2025, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Ulama_in_Contemporary_Islam&oldid=1291848820, accessed 5 Jun 2025.
- “Transformasi Sosial dan Politik Quraisy Setelah Kehadiran Islam”, *NU Online*, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/transformasi-sosial-dan-politik-quraisy-setelah-kehadiran-islam-upwX2>, accessed 18 Jun 2025.